

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN I

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

TAHUN ANGGARAN 2023



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang, Jawa Tengah 50136, Indonesia
T. (024) 8316315, 8314312 F. (024)8414811 HP. 082134525006
e. bbtpi.kemenperin@gmail.com

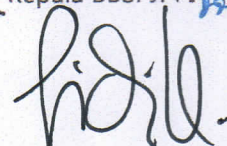
KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan I tahun 2023 Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan I Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun anggaran 2023 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2023 baik dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Dalam laporan ini juga memaparkan realisasi yang telah dicapai oleh Satker pada triwulan tersebut, serta pengawasan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, April 2023

A. Kepala BBSPJPI 
Dr Sidik Herman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	3
1.3. Struktur Organisasi	4
Bab. II Rencana Kegiatan	6
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2021	6
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	11
Bab. III Pelaksanaan Kegiatan	17
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja	17
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	34
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan	94
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	101
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	101
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan.....	102
3.3. Langkah Tindak Lanjut	103
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	103
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan.....	105
Bab. IV Penutup	106
Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2023	
Lampiran 2: Form Pengukuran Rencana Aksi	
Lampiran 3: Form ALKI	
Lampiran 4: Form Monitoring Kepegawaian	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi :

- a Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk.
- b Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
- c Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Sistem Mutu
- d Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
- e Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
 - Konsultasi Keteknikan
 - Rancang Bangun dan Rekayasa
- f Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Teknis

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN /PROGRAM

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menetapkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri, meningkatkan kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri, meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri dan meningkatkan *good governance*.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada periode 2021-2024, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024, serta Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada pelaksanaan:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta konsultasi/fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan Program/Kegiatan tahunan sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung capaian target dan sasaran strategis sekaligus dukungan atas pelaksanaan Tupoksi diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan Program/Kegiatan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan beserta kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan sekaligus sebagai dasar acuan untuk menilai capaian/realisasi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Kinerja, telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target kinerja.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, disamping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program kegiatan yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II, Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan , program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Ketua Tim Kerja.

BAB. II

RENCANA KEGIATAN

2.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024, Visi BBSPJPPI adalah "*Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing*". Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi "*Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau*". Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pada tahun 2023 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2023 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 32.177.573.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran di tingkat internal BBSPJPPI, telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 pada 26 Desember 2023, revisi dalam rangka Pemenuhan Automatic Adjustment Belanja BBSPJPPI Tahun Anggaran 2023. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala BSKJI Nomor 684/BSKJI/PR/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah dilakukan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) pada sumber anggaran Rupiah Murni dalam DIPA TA 2023 sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Kepala BSKJI sebesar Rp. 1.448.702.000,-
Revisi dalam rangka pemenuhan nilai *Automatic Adjustment* dilakukan dengan mencantumkan beberapa pos anggaran sumber dana Rupiah Murni (RM) dalam catatan halaman IV DIPA (blokir) diantaranya dari RO 6042.EBA.994 Layanan Perkantoran pada pos anggaran belanja gaji dan tunjangan (gaji dan tunjkin ke-14 serta tunjkin bulan Desember) dengan total nilai sebesar Rp. 1.448.702.000,- tanpa merubah pagu anggaran.

- b. Revisi ke-2 pada 27 Januari 2023, revisi pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanpa merubah pagu.
- c. Revisi ke-3 pada 21 Februari 2023, dengan pertimbangan revisi adalah revisi realokasi anggaran kegiatan DAPATI 2023. Pagu anggaran BBSPJPPI TA 2023 mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 192.513.000,- yang berasal dari realokasi anggaran kegiatan DAPATI TA 2023 dari DIPA Pusat OPTIKJI ke dalam DIPA BBSPJPPI, sehingga pagu anggaran BBSPJPPI mengalami penyesuaian berupa penambahan pagu anggaran dari semula Rp. 32.177.573.000,- menjadi Rp. 32.370.086.000,-

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2023 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel. 1 berikut

Tabel 1. Program/Kegiatan BBSPJPPI Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	11.135.483.000
EC.6077	- Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	11.135.483.000
WA	Program Dukungan Manajemen	21.234.603.000
WA.6042	- Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	21.234.603.000

Tabel 2. Klasifikasi Rincian Output dan Anggaran BBSPJPPI Tahun 2023

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp.)
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	255.070.000
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	7.333.900.000
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.354.000.000
4	6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192.513.000
5	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.270.143.000
6	6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	170.165.000
7	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	583.510.000
8	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	210.785.000
Total			32.370.086.000

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPPI Tahun 2023 sesuai DIPA revisi ke-3 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Anggaran BBSPJPPI Tahun 2023

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp. Ribu)		SD/CP
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	11.135.483.000		
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	255.070.000		
013	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	255.070.000		
051	<i>Pemasaran, Promosi, Publikasi dan Pembinaan Hubungan Pelanggan Layanan Teknis</i>		255.070.000	BLU
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	7.333.900.000		
002	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	5.414.790.000		
051	<i>Jasa Pelayanan Teknis Pengujian</i>		5.414.790.000	
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian		1,310.510,000	BLU
B	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran		3,279.280,000	BLU
C	Layanan Pengujian Aneka Komoditi		825,000,000	BLU
022	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	45.390.000		
051	<i>Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi</i>		45.390.000	BLU
034	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	744.090,000		
051	<i>Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi</i>		744.090,000	
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi		206.330,000	BLU
B	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		37,600,000	BLU
C	Layanan Sertifikasi Produk		434,760,000	BLU
D	Layanan Sertifikasi Industri Hijau		37.000.000	BLU
E	Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan		28.400.000	BLU
055	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Pencegahan Pencemaran Industri	192.530.000		
051	<i>Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>		192.530.000	BLU
056	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	219.550.000		
051	<i>Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri</i>	219.550.000		
A	Layanan Audit Energi/ Audit Air/ Audit Lingkungan		193.350.000	BLU
B	Layanan Validasi Dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca		26.200.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp. Ribu)		SD/CP
057	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri	717.550,000		
051	Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri		717.550.000	BLU
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.354.000.000		
013	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	3.354.000.000		
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan		3.354.000.000	BLU
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192.513.000		
053	Jasa Konsultasi Program Dapati		192.513.000	
A	Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol		100.470.000	RM
B	Konsultasi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri		92.043.000	RM
WA	Program Dukungan Manajemen			
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	21.234.603.000		
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.270.143.000		
958	Layanan Hubungan Masyarakat	452.520.000		
051	Pengelolaan Data dan Informasi		401.880.000	BLU
052	Pengelolaan Majalah/jurnal ilmiah dan Publikasi		50.640.000	BLU
962	Layanan Umum	65.160,000		
051	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga		65.160,000	BLU
994	Layanan Perkantoran	19.752.463.000		
001	Gaji dan Tunjangan	13.881.963.000		RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.870.500.000		
A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan		3.363.083.000	BLU & RM
B	Langganan Daya Dan Jasa		711.000.000	RM
C	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor		668.957.000	BLU & RM
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional		249.400,000	RM
E	Pemeliharaan Alat Laboratorium		490.000,000	BLU & RM
F	Pemeliharaan Sarana Kantor		126.010.000	BLU & RM
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh		199.800.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp. Ribu)		SD/CP
H	Penyelenggaraan Poliklinik		62,250,000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	170.165.000		
951	Layanan Sarana Internal	170.165.000		
052	<i>Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi</i>		38.600.000	BLU
053	<i>Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran</i>		131.565.000	RM
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	583.510.000		
954	Layanan Manajemen SDM	126.980.000		
051	Pengelolaan/Manajemen SDM		126.980.000	BLU & RM
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	456.530.000		
051	<i>Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM</i>		456.530.000	
A	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN		112.930.000	BLU
B	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional		55.820.000	BLU
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis		287.780,000	BLU & RM
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	210.785.000		
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	36.900.000		
051	<i>Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran</i>		36.900.000	BLU & RM
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35.645.000		
051	<i>Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi</i>		35.645.000	BLU & RM
955	Layanan Manajemen Keuangan	103.800.000		
051	<i>Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan</i>		103.800.000	BLU & RM
961	Layanan Reformasi Kinerja	34,440,000		
051	<i>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP</i>		34,440,000	BLU

2.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, untuk mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBSPJPPI telah menetapkan sasaran strategi yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategis BBSPJPPI. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka juga telah ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
		2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri
		3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
			2. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
			3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri
			4. Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri
		5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.	
4. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri		

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		yang Berkelanjutan	
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen		
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	1. Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
		2. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
		3. Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal Indeks layanan publik
		4. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja 2. Nilai minimal laporan keuangan

Selain itu terkait dengan pelaksanaan anggaran sesuai DIPA BBSPJPI TA 2023, telah ditetapkan target keluaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Rincian Output dan Target Tahun 2023

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	100 Orang
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	794 Industri
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1 Unit
4	6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	2 Industri
5	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
6	6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	41 Unit
7	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	136 Orang
8	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 Dokumen, Laporan

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2023 berpedoman pada Renstra BBSPJPPI 2021-2024 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja utama pada Perkin ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Renstra pada perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan sesuai Keputusan Kepala BBSPJPPI Nomor 6/BSKJI/BBSPJPPI/SK/I/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2021-2024.

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perkin BBSPJPPI Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2	Persen	IKU
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	5	Perusahaan	IKU
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1.	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10	Persen	IKU

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
		2. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	3	Persen	IKU
		3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	1.940	SPK/Order	IKU
		4. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3	Ruang Lingkup	IKU
		5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62	Persen	IKU
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen	Non IKU
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industry	3,65	Indeks	Non IKU
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks	Non IKU
7.	Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	4,51	Indeks	Non IKU
8.	Penguatan Akuntabilitas	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,6	Nilai	Non IKU

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
	Organisasi				
		2. Nilai minimal laporan keuangan	95	Nilai	Non IKU

BAB. III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada awal tahun 2023 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJPPI kepada Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJPPI.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJPPI dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJPI Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2 Persen	20%	1] Penyusunan rencana kolaborasi dengan industri dan Perguruan Tinggi 2] Pembentukan Tim kerjasama kolaborasi 3] Penyusunan proposal rencana kolaborasi dan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi	40%	1] Penyusunan MOU kerjasama kolaborasi 2] Koordinasi awal pelaksanaan kerjasama kolaborasi 3] Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 4] Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi	70%	1] Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 2] Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi	100%	1] Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 2] Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi 3] Pengukuran dan evaluasi capaian produktivitas/efisiensi kegiatan	Ketua Tim Kerja Optimalisasi Teknologi (Any Kurnia)	Desember 2023

											kerjasama kolaborasi 4] Penyusunan pelaporan capaian kerjasama kolaborasi		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	5 Perusahaan	25%	I. Pemanfaatan Teknologi 1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2] Penyusunan kontrak kerjasama 3] Pelaksanaan identifikasi lapangan dan uji coba skala laboratorium 4] Penyusunan rancangan design awal dan RAB 5] Presentasi design awal II. Implementasi Mutu/Standar 1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan	50%	I. Pemanfaatan Teknologi 1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2] Penyusunan kontrak kerjasama 3] Pelaksanaan dan supervisi lapangan II. Implementasi Mutu/Standar 1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan pelatihan/pendampingan penerapan standar industri 2] Penyusunan silabus dan penunjukan	75%	I. Pemanfaatan Teknologi 1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2] Penyusunan kontrak kerjasama 3] Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4] Uji coba dan pencarian kondisi optimum II. Implementasi Mutu/Standar 1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan pelatihan/pendampingan penerapan standar	100%	I. Pemanfaatan Teknologi 1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2] Penyusunan kontrak kerjasama 3] Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4] Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5] Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan II. Implementasi Mutu/Standar 1] Promosi dan penyampaian	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF), Ketua Tim Kerja Optimalisasi Teknologi (Any Kurnia), Ketua Tim Kerja Pendampingan Konsultansi Industri (Rado Hana P)	Desember 2023
---	---	--	--------------	-----	---	-----	--	-----	--	------	---	---	---------------

				<p>pelatihan/pendampingan penerapan standar industri</p> <p>2] Penyusunan silabus dan penunjukan instruktur</p> <p>3] Pelaksanaan pelatihan/pendampingan penerapan standar industri</p>	<p>instruktur</p> <p>3] Pelaksanaan pelatihan/pendampingan penerapan standar industri</p>	<p>industri</p> <p>2] Penyusunan silabus dan penunjukan instruktur</p> <p>3] Pelaksanaan pelatihan/pendampingan penerapan standar industri</p>	<p>penawaran layanan pelatihan/pendampingan penerapan standar industri</p> <p>2] Penyusunan silabus dan penunjukan instruktur</p> <p>3] Pelaksanaan pelatihan/pendampingan penerapan SI</p>		
--	--	--	--	---	---	--	---	--	--

3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10 Persen	25%	1] Identifikasi lapangan dalam rangka koordinasi awal Tim DAPATI dengan IKM terpilih 2] Penyusunan rencana kerja pelaksanaan DAPATI 3] Persiapan dan pengadaan bahan/peralatan pendukung 4] Persiapan penyusunan laporan pendahuluan	50%	1] Pelaksanaan supervisi lapangan ke lokasi IKM terpilih 2] Pelaksanaan uji coba dan penentuan design operasi 3] Koordinasi internal Tim DAPATI 4] Penyusunan dan penyampaian laporan pendahuluan DAPATI 5] Penyiapan materi monev kegiatan DAPATI Pusat OPTIKJI BSKJI	75%	1] Pelaksanaan supervisi lapangan ke lokasi IKM terpilih 2] Pelaksanaan uji coba dan pencarian kondisi optimum 3] Koordinasi internal Tim DAPATI 4] Penyusunan dan penyampaian laporan kemajuan DAPATI 5] Penyiapan materi monev kegiatan DAPATI Pusat OPTIKJI BSKJI	100%	1] Pelaksanaan supervisi lapangan ke lokasi IKM terpilih 2] Pelaksanaan uji coba dan pencarian kondisi optimum 3] Koordinasi internal Tim DAPATI 4] Pengukuran dan evaluasi capaian produktivitas/efisiensi kegiatan DAPATI 5] Penyusunan dan penyampaian laporan akhir DAPATI 6] Penyiapan materi monev kegiatan DAPATI Pusat OPTIKJI BSKJI	Ketua Tim DAPATI 2023 a) Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol (Januar Arif F); b) Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka	Desember 2023
---	--	---	--------------	-----	---	-----	--	-----	--	------	---	---	---------------

												Industri (Nasuka)	
		2.Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	3 Persen	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF)	Desemb er 2023

						kegiatan pameran		kegiatan pameran		5] Partisipasi pada kegiatan pameran		
	3.Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	30%	<p>1] Penyiapan dokumen kelengkapan asesmen Lembaga Pemeriksa Halal</p> <p>2] Pendampingan asesor pada asesmen Lembaga Pemeriksa Halal oleh BPJPH</p> <p>3] Penyiapan dokumen tindak lanjut hasil asesmen LPH</p> <p>4] Pengajuan usulan Penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Industri</p> <p>5] Identifikasi peluang pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/</p>	60%	<p>1] Menyiapkan dokumen kelengkapan pengajuan sebagai Lembaga Verifikasi Industri</p> <p>2] Pengajuan usulan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi ke KAN</p> <p>3] Pelaksanaan asesmen dalam rangka pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi ke KAN</p> <p>4] Menyiapkan tindak lanjut hasil asesmen KAN</p>	80%	<p>1] Pengajuan usulan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi ke KAN</p> <p>2] Pelaksanaan asesmen dalam rangka pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi ke KAN</p> <p>3] Menyiapkan tindak lanjut hasil asesmen KAN</p>	100%	<p>1] Monitoring penyelesaian tindaklanjut dan penerbitan sertifikat perluasan ruang lingkup oleh KAN</p>	<p>Ketua Tim Kerja Sertifikasi (MS. Edy), Ketua Tim Kerja Pengujian (Cholid S), Ketua Tim Kerja Kalibrasi (Adi P)</p>	Desember 2023

					sertifikasi								
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62 Persen	30%	1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2] Pengisian aplikasi P3DN 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4] Mengutamakan pembelian produk	50%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	75%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	100%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk	Kabag TU , Ketua Tim Rumah Tangga dan Pengadaan	Desember 2023

					dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN						dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN		
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92,5 Persen	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit	85%	1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	100%	1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat	Kabag TU, Ketua Tim Kerja Program	Desember 2023

	Efisien	oleh satker			tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III		kinerja		2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3] Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4] Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5] Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan		penyelesaian hasil pengawasan	dan Pelaporan (Kukuh AW)	
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan	Indeks kepuasan Masyarakat	3,65 Indeks	25%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu	50%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu	75%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu	100%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu	Ketua Tim Kerja Pemasaran	Desember 2023

	di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan				2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)		2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) 6] Pelaksanaan Temu Pelanggan untuk memperoleh umpan balik pelanggan		2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)		2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) 6] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan	dan Kemitraan (Dyah AF)	
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang	1. Rata-rata indeks profesionalitas	78 Indeks	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan	50%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan	75%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan	100%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan	Ketua Tim Kerja Kepegawaia	Desember 2023

	profesional	ASN			diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM		diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM		diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM		dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	n (Agung B)	
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	4,51	30%	1] Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDii, SK	50%	1] Pengembangan/pemutakhiran SINDii. 2] Update website secara berkala	75%	1] Pengembangan/pemutakhiran SINDii. 2] Update website secara berkala	100%	1] Update website secara berkala 2] Update Medsos secara berkala dan	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan	Desember 2023

				<p>Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik)</p> <p>2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi.</p> <p>3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala.</p> <p>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan</p> <p>5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat.</p>	<p>3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat</p> <p>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat</p> <p>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik</p> <p>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS</p>	<p>3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat</p> <p>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat</p> <p>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik</p> <p>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS</p>	<p>setiap saat</p> <p>3] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat</p> <p>4] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik</p> <p>5] Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan</p>	<p>Kemitraan (Dyah AF)</p> <p>Ketua Tim</p> <p>Pengelola dan</p> <p>Pengembangan</p> <p>Teknologi dan</p> <p>Informasi Digital</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

					6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin 7] Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik (bimtek/study banding)								
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,6	30%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB	60%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen 3] Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil	80%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III) 2] Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	100%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan (Kukuh Aryo W)	Desember 2023

				88/2021		evaluasi SAKIP							
		2.Nilai minimal laporan keuangan	95	35%	1] Penyusunan laporan keuangan unaudited untuk pelaporan keuangan periode tahun sebelumnya 2] Koordinasi penyusunan laporan keuangan unaudited dengan bagian keuangan Ses BSKJI 3] Review laporan keuangan oleh Itjen 4] Pelaksanaan audit laporan keuangan unaudited oleh KAP	60%	1] Pelaksanaan penilaian laporan keuangan audited periode tahun sebelumnya oleh Biro Keuangan 2] Penyusunan laporan keuangan Semester I periode tahun berjalan 3] Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester I periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses BSKJI 4] Review laporan keuangan oleh Itjen	80%	1] Penyusunan laporan keuangan Triwulan III periode tahun berjalan	100%	1] Penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan 2] Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses BSKJI 3] Review laporan keuangan oleh Itjen 4] Pelaksanaan audit PIPK dalam rangka pelaporan keuangan tahun berjalan	Ketua Tim Kerja Keuangan (Nanik Karyawati)	Desember 2023

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Perkin sampai dengan Triwulan I TA. 2023, terlihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8: Realisasi Rencana Aksi per Triwulan I Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2 Persen	20%	10%	1] Penyusunan rencana kolaborasi dengan industri dan Perguruan Tinggi 2] Pembentukan Tim kerjasama kolaborasi 3] Penyusunan proposal rencana kolaborasi dan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi	B1 : Telah dilakukan penyusunan draf SK pembentukan Tim kerjasama kolaborasi B2 : Telah dilakukan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi dengan industri air minum dalam kemasan PT Bayuadji Nusantara Industries, PT Ungaran Sari Garmen . B3 : Koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi dengan perguruan tinggi UNNES, UNS, dan UNDIP
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	5 Perusahaan				
			1. Kerjasama Optimalisasi dan Pendampingan IPAL dengan PT MIRASA	25%	20%	1] Finalisasi gambar desain 2] Setting lay out lapangan pada lokasi calon IPAL 3] Supervisi pembangunan IPAL tahap 1 dan 2	B1 : Finalisasi gambar desain mengikuti perubahan yang dikehendaki oleh PT MFI B2 : Melakukan setting lay out sesuai gambar desain final di calon lokasi IPAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
			FOOD Industry				B3 : Supervisi pembangunan IPAL yang telah dilakukan oleh PT MFI sesuai desain final tahap 1 (dari total 4 tahap)
			2. Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis dengan PT Desa Wisata Indonesia	85%	85%	1] Identifikasi dan penggalan data teknis 2] Penyusunan dokumen standard teknis 3] Presentasi draft dokumen standard teknis di PT. Desa Wisata Indonesia 4] Submit dokumen standard teknis ke DLH 5] Pemaparan dokumen Pertek dan penjelasan pada saat Penilaian Substantif di DLH	B1 : 1] Penandatanganan SPK pada tanggal 2 Januari 2023 sesuai Nomor SPK T/1/BSKJI/BBSPJPI/SPK/01/2023 2] Identifikasi serta penggalan data teknis B2 : 1] Penyusunan dokumen Standard teknis 2] Presentasi draft dokumen standard teknis di PT. Desa Wisata Indonesia tanggal 6 Februari 2023 3] Telah dilakukan submit dokumen standard teknis ke DLH tanggal 24 februari 2023 B3 : 1] Screening awal dan dilakukan perbaikan dokumen yang harus direvisi lalu dilakukan submit dokumen standard teknis ke DLH kembali tanggal 20 Maret 2023 2] Pemaparan Pertek atau penilaian substansi di DLH tgl 30 Maret 2023
3	Meningkatnya Kemampuan	1. Produktivitas/efis	10 Persen				

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
	Industri barang dan Jasa Dalam Negeri	iensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi					
		A. Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol		10%	10%	1. Survey data teknis dan identifikasi proses 2. Penyusunan draft PKS 3. Diskusi internal terkait teknologi yang diaplikasikan	B1 : Diskusi internal terkait teknologi yang diaplikasikan B2 : Penyusunan draft PKS B3 : Survey data teknis dan identifikasi proses
		B. Konsultasi Optimalisasi proses produksi garam konsumsi beryodium dan garam aneka industri		10%	10%	1. Survey data teknis dan fisik 2. Penandatanganan SPK 3. Diskusi rencana penerapan teknologi	B1 : Diskusi rencana penerapan teknologi B2 : Penyusunan SPK B3 : Survey lapangan untuk mendapatkan data teknis dan fisik.
		2.Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	3 Persen	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk	B1 : 1. Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik dan kegiatan study banding (BP. Batam) 2. Jasa layanan : 109 Penawaran kontrak kerjasama 3. Industri yang menerima layanan jasa teknis kepada 103 industri, sesuai permintaan yang disepakati 4. Untuk menjaga kesetiaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
						menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	<p>pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telpon, WA, kunjungan ke industri (pelayanan prima)</p> <p>5. Penerimaan PNBP BBSPJPPI Januari 2023 : Rp 1.285.445.440,- (8,57%) dari target Rp 15.000.000.000,-</p> <p>B2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik dan kegiatan study banding (AKAFARMA) Jasa layanan : 101 Penawaran kontrak kerjasama Industri yang menerima layanan jasa teknis kepada 73 industri, sesuai permintaan yang disepakati Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telpon, WA (pelayanan Prima) Penerimaan PNBP Januari - Pebruari Rp 2.020.549.443,- (13,47%) dari target. <p>B3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
							kegiatan pendampingan dan konsultasi pada industri dan kerjasama dgn Telkomsel dalam rangka grand launching PIDDI 4.0 Kemenperin (14-17 Maret 2023) 2] Jasa layanan : 95 Penawaran kontrak kerjasama 3] Industri yang menerima layanan jasa teknis kepada 65 industri sesuai permintaan yang disepakati. 4] Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telpon dan WA (pelayanan prima) 5] Penerimaan PNPB Januari-Maret sebesar : Rp. 2.915.573.770,- (19,44 %) dari target.
		3.Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	1.940 SPK / Order	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada	B1 : Menarik data dari SINDII, jumlah transaksi/order Januari untuk <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian : 194 transaksi • Kalibrasi : 9 transaksi • Sertifikasi : 32 transaksi B2 : Menarik data dari SINDII, jumlah transaksi/order Bulan Februari untuk <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian : 232 transaksi • Kalibrasi : 13 transaksi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
						<p>pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi : 53 transaksi <p>B3 : Menarik data dari SINDII, jumlah transaksi/order Maret untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian : 231 transaksi • Kalibrasi : 11 transaksi • Sertifikasi : 55 transaksi <p>Jumlah seluruh transaksi Januari-Maret sebanyak 830 transaksi</p>	
		4.Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	25%	25%	<p>1] Penyiapan dokumen kelengkapan asesmen Lembaga Pemeriksa Halal</p> <p>2] Pendampingan asesor pada asesmen Lembaga Pemeriksa Halal oleh BPJPH</p> <p>3] Penyiapan dokumen tindak lanjut hasil asesmen LPH</p> <p>4] Pengajuan usulan Penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Industri</p> <p>5] Identifikasi peluang pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi</p> <p>B1 :</p> <p>1] Telah dilakukan penyusunan dan penyiapan dokumen kelengkapan persyaratan untuk proses pengajuan akreditasi LPH BBSPJPPI</p> <p>2] Proses asesmen awal dalam rangka akreditasi LPH BBSPJPPI oleh Tim Asesmen BPJPH telah dilaksanakan pada 15 sd 17 Februari 2023</p> <p>3] Pembahasan tindak lanjut hasil asesmen LPH BBSPJPPI pada 27 Februari 2023. Dokumen hasil tindak lanjut telah disampaikan kepada Tim Sesmen BPJPH pada 23 Maret 2023</p> <p>B2 :</p> <p>1] Pelaksanaan asesmen awal dalam rangka akreditasi LPH BBSPJPPI telah dilaksanakan pada 15 sd 17 Februari 2023 oleh Tim Asesor BPJPH</p>	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
							<p>2] Telah dilakukan pembahasan tindak lanjut atas hasil asesmen awal pengajuan akreditasi LPH BBSPJPI pada 27 Februari 2023. Bukti tindak lanjut hasil asesmen telah disampaikan kepada Tim Asesor BPJPH pada tanggal 28 Februari 2023 dan menunggu hasil verifikasi dari BPJPH</p> <p>B3 :</p> <p>1] Pengajuan usulan sebagai Lembaga Verifikator Independen Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP sesuai Nota Dinas Kepala BSKJI kepada Menperin Nomor B/168/BSKJI/IND/III/2023 tanggal 3 Maret 2023</p> <p>2] Identifikasi parameter yang akan diakreditasi</p> <p>3] Usulan parameter yang akan diakreditasi yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lab AK : Hg dalam garam - Lab Udara : ISBB (Indeks Suhu Bola Basah) , Kebisingan Ruang kerja , Intensitas Cahaya - Lab Instrumen : Logam Cd, Pb, Zn, Cu dan Ni pada air laut ; Logam Al pada air minum ; Boron pada air permukaan <p>4]Verifikasi dan validasi pengujian parameter yang akan diakreditasi.</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		5.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62 Persen	30%	30%	<p>1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan</p> <p>2] Pengisian aplikasi P3DN</p> <p>3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%</p> <p>4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan</p> <p>5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN</p>	<p>B1 :</p> <p>1] Mengidentifikasi potensi penggunaan PDN/TKDN pada kegiatan pengadaan barang/jasa;</p> <p>2] Penginputan data rencana pengadaan di aplikasi SIRUP LKPP;</p> <p>3] Melakukan tagging PDN di rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP;</p> <p>4] Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;</p> <p>5] Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon</p> <p>B2 :</p> <p>1] Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;</p> <p>2] Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon</p> <p>B3 :</p> <p>1] Mengajukan persetujuan penggunaan produk impor untuk peralatan pengujian, spare part, dan bahan-bahan untuk pengujian di laboratorium sesuai nota dinas nomor 170/BSKJ/BBSPJPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;</p> <p>2] Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;</p> <p>3] Penginputan data P3DN pada aplikasi Siswas P3DN BPKP</p> <p>4] TKDN BBSPJPI Bulan Januari-Maret 2023 sebesar</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
							18,02 %.
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5 Persen	15%	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	B1 : 1] Penyampaian ND Ka BBSPJPPI Nomor 11/BSKJI/BBSPJPPI/PR/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI Tahun 2023 2] Masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan BBSPJPPI Tahun 2023 B2 : 1] Sesuai hasil koordinasi awal dengan pihak Inspektorat III, sesuai rencana pelaksanaan audit kinerja periode 2023 pada satker BBSPJPPI dijadwalkan pada bulan September 2023
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	Indeks kepuasan Masyarakat	3,65	25%	25%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM	B1 : 1. Layanan satu pintu bagian Pengembangan Jasa Teknis BBSPJPPI melalui Admin Balai No telpon. 024-8450651 HP. 0821 3452 5006, Web (bbspjppi.kemenperin.go.id), Email (bbspjppi.kemenperin@gmail.com), web (bbspjppi.kemenperin.go.id), desk layanan publik di loby/PC 2. Evaluasi SPM Januari

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
						(IPP dan IPAK)	<p>rata-2 SPM : 11, 25 hari (530 sampel)</p> <p>3. Tidak terdapat keluhan/complain layanan dari pelanggan.</p> <p>4. Penyebaran kuesioner sejumlah 121 pelanggan, kembali sebanyak 39 kuesioner</p> <p>B2 :</p> <p>1. Layanan satu pintu bagian Pengembangan Jasa Teknis BBSPJPI melalui Admin Balai No telpon. 024-8450651 HP. 0821 3452 5006, Web (bbspjppi.kemenperin.go.id), Email (bbspjppi.kemenperin@gmail.com), web (bbspjppi.kemenperin.go.id), desk layanan publik di loby/PC</p> <p>2. Evaluasi SPM Januari rata-2 SPM : 10,55 hari (1008 sampel)</p> <p>3. Tidak terdapat keluhan/complain layanan dari pelanggan.</p> <p>4. Penyebaran kuesioner sejumlah 97 pelanggan, kembali sebanyak 22 kuesioner</p> <p>5. Hasil evaluasi penilaian Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)</p> <p>a. Nilai Indeks : A .</p> <p>b. IPP : 3,740 rata-2 indeks 93,508.</p> <p>c.. IPAK : 3,891 rata-2</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
							<p>indeks 97,277</p> <p>B3 :</p> <p>1. Layanan satu pintu bagian Pengembangan Jasa Teknis BBSPJPI melalui Admin Balai No telpon. 024-8450651 HP. 0821 3452 5006, Web (bbspjppi.kemenperin.go.id), Email (bbspjppi.kemenperin@gmail.com), web (bbspjppi.kemenperin.go.id), desk layanan publik di loby/PC</p> <p>2. Evaluasi SPM Januari rata-2 SPM : 10,55 hari (1549 Sampel)</p> <p>3. Tidak terdapat keluhan/complain layanan dari pelanggan.</p> <p>4. Penyebaran kuesioner sejumlah 97 pelanggan, kembali sebanyak 23 kuesioner</p> <p>5. Hasil evaluasi penilaian Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)</p> <p>a. Nilai Indeks : A</p> <p>b. IPP : 3,648 rata-2 indeks 91,193.</p> <p>c. IPAK : 3,727 rata-2 indeks 93,182</p>
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78 Indeks	25%	25%	<p>1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural</p> <p>2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webin</p>	<p>B1 :</p> <p>1. Telah disusun rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural TA 2023</p> <p>2. Fasilitasi Pelatihan Teknis Penyegaran</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
						<p>ar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai</p> <p>3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala</p> <p>4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM</p>	<p>Skema Sertifikasi, SNI dan Proses Bisnis</p> <p>3. Fasilitasi Pelatihan Teknis Analisa, Pengambilan Contoh dan Perhitungan Pengujian Sampel Udara (Emisi, Ambien, Kebisingan, ISBB) dan Jaminan Mutu.</p> <p>B2 :</p> <p>1. Fasilitasi pelatihan udara TKBT (Tenaga Kerja Bangunan Tinggi) tingkat II di Indonesia Power.</p> <p>B3 :</p> <p>1. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi PPC Lingkungan (Air dan Udara)</p> <p>2. Fasilitasi persiapan pelatihan PPC Produk.</p> <p>3. Pegawai BBSPJPI yang sudah mengikuti workshop/Bimtek/Seminar/webinar Bulan Januari-Maret 2023 sebanyak 72 pegawai.</p>
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	4,51	30%	20%	<p>1] Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik)</p> <p>2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi.</p> <p>3] Update standar pelayanan dan</p>	<p>B1 :</p> <p>1. Belum dilakukan penyusunan /draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) masih menggunakan SK 2023, (Belum terlaksana, menunggu menunggu</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
						<p>pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala.</p> <p>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan</p> <p>5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat.</p> <p>6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin</p> <p>7] Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik (bimtek/study banding)</p>	<p>pelantikan Ka. Balai).</p> <p>2. Pengembangan dashboard SINDIi modul HALAL</p> <p>3. Update informasi layanan publik; website (berkala), pembuatan video e-training (proses), update medsos (berkala dan setiap waktu kegiatan BBSPJPPJ).</p> <p>4. Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin (terjadwal dari Kemenperin).</p> <p>B2 :</p> <p>1. Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) masih menggunakan SK 2023, (Belu terlaksanan, menunggu menunggu pelantikan Ka. Balai).</p> <p>2. Pengembangan dashboard SINDIi modul HALAL dan update modul e-training</p> <p>3. Update informasi layanan publik; website (berkala), upload modul e-training pada SINDIi, update medsos (berkala dan setiap waktu kegiatan BBSPJPPJ).</p> <p>4. Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin (terjadwal dari</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
							<p>Kemenperin).</p> <p>B3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) masih menggunakan SK 2023, (Belu terlaksanan, menunggu menunggu pelantikan Ka. Balai). 2. Pengembangan dashboard SINDIi modul HALAL dan update modul e-training, video e-training (proses upload) 3. Update informasi layanan publik; website (berkala), upload modul e-training pada SINDIi, update medsos (berkala dan setiap waktu kegiatan Balai). 4. Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin (terjadwal dari Kemenperin). 5. Peningkatan kompetensi SDM : pelatihan penyusunan Daftar Informasi Kearsipan (DIK), Daftar Informasi Publik (DIP), web programing (rencana bulan April 2023) 6. Pendaftaran produk AiMS pada kanal mic.kemenperin.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,5	30%	30%	<p>1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I)</p> <p>4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021</p>	<p>B1 :</p> <p>1] Telah dilakukan penyusunan dan penyampaian usulan dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPPI TA 2023 sesuai ND Ka BBSPJPPI Nomor 12/BSKJI/BBSPJPPI/PR/1/2023 tanggal 12 Januari 2023.</p> <p>2] Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renkin) TA 2024 sebagai dasar acuan pengajuan usulan anggaran BBSPJPPI TA 2024. Dokumen Renkin BBSPJPPI TA 2024 telah disusun pada 27 Januari 2023 dengan besaran pengajuan usulan anggaran sebesar Rp. 38.965.780.000,-</p> <p>3] Pengumpulan data capaian kinerja bulanan dan pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Smart DJA, eMonev Bappenas)</p> <p>B2 :</p> <p>1] Telah dilakukan penyesuaian usulan dokumen Tapkin/Perkin BBSPJPPI TA 2023 sesuai hasil masukan bagian Program Sekretariat BSKJI. Dokumen Tapkin/Perkin BBSPJPPI TA 2023 telah</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
							<p>disetujui dan ditandatangani pada 10 Februari 2023</p> <p>2] Pengumpulan data capaian kinerja bulanan dan pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Smart DJA, eMonev Bappenas)</p> <p>B3 :</p> <p>1] Telah dilakukan penyiapan dokumen kelengkapan bukti tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode 2021</p> <p>2] Telah dilakukan penyiapan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP periode 2023 pada satker BBSPJPPI</p> <p>3] Pelaksanaan koordinasi persiapan evaluasi SAKIP Satker BSKJI Tahun 2023 pada 16 Maret 2023</p> <p>4] Koordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP pada satker BBSPJPPI</p> <p>5] Pengumpulan data capaian kinerja bulanan dan pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Smart DJA, eMonev Bappenas)</p> <p>6] Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PP 39 Triwulan I 2023</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		2.Nilai minimal laporan keuangan	95	35%	35%	<p>1] Penyusunan laporan keuangan unaudited untuk pelaporan keuangan periode tahun sebelumnya</p> <p>2] Koordinasi penyusunan laporan keuangan unaudited dengan bagian keuangan Ses BSKJI</p> <p>3] Review laporan keuangan oleh Itjen</p> <p>4] Pelaksanaan audit laporan keuangan unaudited oleh KAP</p>	<p>B1 :</p> <p>1] Penyiapan dokumen dan kelengkapan untuk audit laporan keuangan BLU 2023 oleh KAP</p> <p>2] Rekonsiliasi SAKTI dan OMSPAN data keuangan</p> <p>3] Mengikuti pra workshop penyusunan LK BSKJI 2023 pada 19 Januari 2023</p> <p>4] Mengikuti workshop penyusunan LK BSKJI 2023 pada 31 Januari sd 2 Februari 2023</p> <p>5] Penyusunan laporan keuangan unaudited 2023 dan data dukung laporan</p> <p>6] Telah dilakukan penunjukan KAP Ashari & Ida Nurhayati untuk proses audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2023 berdasarkan SPK Nomor 58/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/II/2023 tanggal 13 Februari 2023</p> <p>7] Pelaksanaan dan penilaian PIPK satker BBSPJPPI periode tahun 2023.</p> <p>B2 :</p> <p>1] Pembukaan audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2023 oleh KAP pada 13 Februari 2023</p> <p>2] Pengumpulan kelengkapan permintaan data audit BPK</p> <p>3] Pelaksanaan review atas laporan keuangan unaudited 2023 oleh Tim</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
							<p>Inspektorat III pada 20-24 Februari 2023</p> <p>4) Catatan atas Laporan Keuangan BBSPJPPI 2023 (Unaudited) telah disusun dan disampaikan ke Biro Keuangan pada 17 Februari 2023</p> <p>B3 :</p> <p>1) Closing Meeting audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2023 oleh KAP pada 24 Maret 2023</p> <p>2) Pengisian Capaian Output periode bulan Jan-Feb pada aplikasi SAKTI.</p>

A. Sasaran Strategis I : Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas

Tabel 9. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis I Triwulan I TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2 Persen	20%	10%	1] Penyusunan rencana kolaborasi dengan industri dan Perguruan Tinggi 2] Pembentukan Tim kerjasama kolaborasi 3] Penyusunan proposal rencana kolaborasi dan koordinasi peninjakan kerjasama kolaborasi	B1 : Telah dilakukan penyusunan draf SK pembentukan Tim kerjasama kolaborasi B2 : Telah dilakukan koordinasi peninjakan kerjasama kolaborasi dengan industri air minum dalam kemasan PT Bayuadji Nusantara Industries, PT Ungaran Sari Garmen . B3 : Koordinasi peninjakan kerjasama kolaborasi dengan perguruan tinggi UNNES, UNS, dan UNDIP

Sasaran Kegiatan I terdiri dari Indikator Kinerja :

1) Indikator Kinerja : Produktivitas / efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

Hasil kolaborasi yang berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual , spesifikasi, rancangan atau prototipe maupun bentuk pengembangan industri lain seperti problem solving industri harus dapat diukur outcomenya.

Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.

Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil (beririsan) dari kegiatan lain seperti kegiatan DAPATI/Pinoti selama memenuhi syarat kolaborasi (melibatkan tiga pihak meliputi akademisi, Lembaga penelitian, industri ataupun instansi lainnya). Kegiatan kolaborasi yang dihitung produktivitas/efisiensinya dapat dilakukan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Perhitungan rata-rata nilai ukuran performansi hasil kegiatan kolaborasi diukur dari performansi sebelum kegiatan kolaborasi dengan performansi sesudah kegiatan kolaborasi.

a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini ditetapkan sebesar 20 % yang meliputi :

- 1 Penyusunan rencana kolaborasi dengan industri dan Perguruan Tinggi
- 2 Pembentukan Tim kerjasama kolaborasi
- 3 Penyusunan proposal rencana kolaborasi dan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi

Adapun realisasi capaian tercapai 10 % dengan realisasi dari kegiatan yaitu :

1. Telah dilakukan penyusunan draf SK pembentukan Tim kerjasama kolaborasi
2. Telah dilakukan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi dengan industri air minum dalam kemasan PT Bayuadji Nusantara Industries ; PT Ungaran Sari Garmen
3. Koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi dengan perguruan tinggi UNNES, UNS, dan UNDIP.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target sd Triwulan I belum berhasil dilaksanakan dimana progres masih dalam tahap proses peninjauan belum diperoleh komitmen dari para pihak untuk berkolaborasi yang ditindaklanuti melalui penyusunan proposal kegiatan kolaborasi.

b) Kendala

Pada pelaksanaan kegiatan kolaborasi sampai Triwulan I TA 2023 masih belum mendapatkan partner kolaborasi.

Tindak lanjut dari kendala di atas adalah koordinasi dengan tim kerjasama yang

telah ditunjuk untuk menjaring industri dan akademisi yang bersedia untuk berkolaborasi.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah BBSPJPPI perlu meningkatkan koordinasi tim Kerjasama dan monitoring progress terhadap klien yang sudah mengajukan atau menjadi target kolaborasi.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan promosi yang gencar untuk menjaring pihak yang akan berkolaborasi dengan BBSPJPPI.

B. Sasaran Strategis II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Tabel 10 .Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis I Triwulan I TA 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	5 Perusahaan				5 Perusahaan
			1. Kerjasama Optimalisasi dan Pendampingan IPAL dengan PT MIRASA FOOD Industry	25%	20%	1) Finalisasi gambar desain 2) Setting lay out lapangan pada lokasi calon IPAL 3) Supervisi pembangunan IPAL tahap 1 dan 2	B1 : Finalisasi gambar desain mengikuti perubahan yang dikehendaki oleh PT MFI B2 : Melakukan setting lay out sesuai gambar desain final di calon lokasi IPAL B3 : Supervisi pembangunan IPAL yang telah dilakukan oleh PT MFI sesuai desain final tahap 1 (dari total 4 tahap)
			2. Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis dengan PT	85%	85%	1) Identifikasi dan penggalan data teknis 2) Penyusunan dokumen standard	B1 : 1) Penandatanganan SPK pada tanggal 2 Januari 2023 sesuai Nomor SPK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			Desa Wisata Indonesia			teknis 3] Presentasi draft dokumen standard teknis di PT. Desa Wisata Indonesia 4] Submit dokumen standard teknis ke DLH 5] Pemaparan dokumen Pertek dan penjelasan pada saat Penilaian Substantif di DLH	T/1/BSKJI/BBSPJPI/SP K/01/2023 2] Identifikasi serta penggalan data teknis B2 : 1] Penyusunan dokumen Standard teknis 2] Presentasi draft dokumen standard teknis di PT. Desa Wisata Indonesia tanggal 6 Februari 2023 3] Telah dilakukan submit dokumen standard teknis ke DLH tanggal 24 februari 2023 B3 : 1] Screening awal dan dilakukan perbaikan dokumen yang harus direvisi lalu dilakukan submit dokumen standard teknis ke DLH kembali tanggal 20 Maret 2023 2] Pemaparan Pertek atau penilaian substansi di DLH tgl 30 Maret 2023

Sasaran Kegiatan II terdiri dari Indikator Kinerja :

1) **Indikator Kinerja : Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri**

Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri.

Kegiatan peningkatan peran balai ini dapat berupa asesmen, pelatihan, pendampingan, konsultasi, bimbingan transformasi industri 4.0, dan pendampingan, konsultasi, bimbingan penerapan standardisasi industri (standar mutu, standar berkelanjutan, standar industri hijau).

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Sampai Triwulan I TA 2023 sudah tercapai 2 (dua) perusahaan pada realisasi peningkatan peran balai dalam pengembangan industri terkait dengan konsultasi terkait implementasi teknologi dan pendampingan penyusunan persetujuan teknis yang meliputi :

Tabel 11. Indikator Kinerja : Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Jasa Konsultansi yang diberikan	Bukti Pemanfaatan Teknologi Industri/Standar
1	PT MIRASA FOOD Industry	Industri Makanan (Keripik Singkong)	Kerjasama Optimalisasi dan Pendampingan IPAL	SPK Nomor 385/BSKJI/BBSPJPPI/HK-SPK/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022
2	PT Desa Wisata Indonesia	Perusahaan penyedia jasa rekreasi keluarga	Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis	SPK Nomor T/1/BSKJI/SPK/01/2023 tanggal 2 Januari 2023

Adapun progres capaian untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut sebagai berikut :

- PT. MIRASA Food Industry

Pada Triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 20 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah

- 1 Finalisasi gambar design
- 2 Setting lay out lapangan pada lokasi calon IPAL
- 3 Supervisi pembangunan IPAL tahap 1 dan 2.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu

1. Telah dilakukan finalisasi gambar desain IPAL mengikuti perubahan yang dikehendaki oleh PT. Mirasa Food Industry.
2. Melakukan setting lay out sesuai gambar desain final di calon lokasi IPAL.
3. Supervisi pembangunan IPAL yang telah dilakukan oleh PT. Mirasa Food Industry sesuai desain final tahap 1 (total ada 4 tahap).

Dari data di atas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, target kinerja sd Tw I masih belum berhasil dilaksanakan dimana proses supervisi baru dilakukan untuk pembangunan tahap I.

- PT. Desa Wisata Indonesia

Pada Triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini adalah 85% dengan realisasi 85 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah

- 1 Identifikasi dan penggalan data teknis
- 2 Penyusunan dokumen standard teknis
- 3 Presentasi draft dokumen standard teknis di PT. Desa Wisata Indonesia
- 4 Submit dokumen standard teknis ke DLH
- 5 Pemaparan dokumen Pertek dan penjelasan pada saat Penilaian Substantif di DLH
- 6 Perbaiki dokumen sesuai berita acara di Penilaian Substantif

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu

1. Telah dilakukan penandatanganan SPK pada tanggal 2 Januari 2023 sesuai SPK Nomor T/1/BSKJI/BBSPJPPI/SPK/01/2023
2. Identifikasi serta penggalan data teknis
3. Penyusunan dokumen Standard teknis
4. Presentasi draft dokumen standard teknis di PT. Desa Wisata Indonesia tanggal 6 Februari 2023
5. Telah dilakukan submit dokumen standard teknis ke DLH tanggal 24 Februari 2023
6. Pemaparan Pertek atau penilaian substansi di DLH pada tanggal 30 Maret 2023

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, target kinerja sd Tw I sudah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

- Proses penyiapan lahan (cut and fill) memerlukan waktu cukup lama sehubungan adanya kendala teknis ketersediaan peralatan pendukung.

c) Rekomendasi

Tindak lanjut pada kendala pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan diatas yaitu:

- Melakukan supervisi dan memantau kelanjutan pembangunan IPAL PT. Mirasa Food Industry agar sesuai desain BBSPJPI.
- Perbaiki Perbaikan dokumen sesuai berita acara di Penilaian Substantif pada PT. Desa Wisata Indonesia.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan manajemen perusahaan berpengaruh pada tahap proses pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah memonitoring progress capaian setiap kegiatan yang sudah berjalan agar terlaksana sesuai jadwal kegiatan.

Selain itu, mempertimbangkan hingga Triwulan I 2023 baru diperoleh kesepakatan untuk 2 (dua) perusahaan maka upaya kegiatan promosi atas jasa layanan dan kapabilitas kemampuan layanan BBSPJPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta penerapan standar industri agar tetap didorong dan ditingkatkan untuk dapat menjangkau pelanggan baru sehingga target jumlah perusahaan yang dilayani dapat tercapai.

C. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Tabel 12. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis III Triwulan I TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas / efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10 %				
		A. Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol pada PT Retota Sakti		10 %	10 %	1. Survey data teknis dan identifikasi proses 2. Penyusunan draft PKS 3. Diskusi internal	B1 : Diskusi internal terkait teknologi yang diaplikasikan B2 : Penyusunan draft PKS B3 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
						terkait teknologi yang diaplikasikan	Survey data teknis dan identifikasi proses
		B. Konsultansi Optimalisasi proses produksi garam konsumsi beryodium dan garam aneka industri pada UD Cap Batery		10 %	10 %	1. Survey data teknis dan fisik 2. Penandatanganan SPK 3. Diskusi rencana penerapan teknologi	B1 : Diskusi rencana penerapan teknologi B2 : Penyusunan SPK B3 : Survey lapangan untuk mendapatkan data teknis dan fisik.
		2. Meningkatnya utilitas layanan jasa industri di dalam negeri	3%	25 %	25 %	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	B1 : 1. Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik dan kegiatan study banding (BP. Batam) 2. Jasa layanan : 109 Penawaran kontrak kerjasama 3. Industri yang menerima layanan jasa teknis kepada 103 industri, sesuai permintaan yang disepakati 4. Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telpon, WA, kunjungan ke industri (pelayanan prima) 5. Penerimaan PNPB BBSPJPPI Januari 2023 : Rp 1.285.445.440,- (8,57%) dari target Rp 15.000.000.000,- B2 : 1. Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik dan kegiatan study banding (AKAFARMA) 2. Jasa layanan : 101 Penawaran kontrak kerjasama 3. Industri yang menerima layanan jasa teknis kepada 73 industri, sesuai permintaan yang disepakati 4. Untuk menjaga kesetiaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telpon, WA (pelayanan Prima)</p> <p>5. Penerimaan PNBPN Januari - Pebruari Rp 2.020.549.443,- (13,47%) dari target.</p> <p>B3 :</p> <p>1. Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik dan kegiatan pendampingan dan konsultasi pada industri dan kerjasama dgn Telkomsel dalam rangka grand launching PIDI 4.0 Kemenperin (14-17 Maret 2023)</p> <p>2] Jasa layanan : 95 Penawaran kontrak kerjasama</p> <p>3] Industri yang menerima layanan jasa teknis kepada 65 industri sesuai permintaan yang disepakati.</p> <p>4] Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telpon dan WA (pelayanan prima)</p> <p>5] Penerimaan PNBPN Januari-Maret sebesar : Rp. 2.915.573.770,- (19,44 %) dari target.</p>
		3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	1940 SPK/Orde r	25 %	25 %	<p>1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI</p> <p>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan</p> <p>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati</p> <p>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan</p>	<p>B1 :</p> <p>Menarik data dari SINDII, jumlah transaksi/order Januari untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian : 194 transaksi • Kalibrasi : 9 transaksi • Sertifikasi : 32 transaksi <p>B2 :</p> <p>Menarik data dari SINDII, jumlah transaksi/order Bulan Februari untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian : 232 transaksi • Kalibrasi : 13 transaksi • Sertifikasi : 53 transaksi <p>B3 :</p> <p>Menarik data dari SINDII, jumlah</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
						kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	transaksi/order Maret untuk <ul style="list-style-type: none"> Pengujian : 231 transaksi Kalibrasi : 11 transaksi Sertifikasi : 55 transaksi Jumlah seluruh transaksi Januari-Maret sebanyak 830 transaksi
		3.Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 PRL	25 %	25 %	<p>1] Penyiapan dokumen kelengkapan asesmen Lembaga Pemeriksa Halal</p> <p>2] Pendampingan asesor pada asesmen Lembaga Pemeriksa Halal oleh BPJPH</p> <p>3] Penyiapan dokumen tindak lanjut hasil asesmen LPH</p> <p>4] Pengajuan usulan Penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Industri</p> <p>5] Identifikasi peluang pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi / sertifikasi</p>	<p>B1 :</p> <p>1] Telah dilakukan penyusunan dan penyiapan dokumen kelengkapan persyaratan untuk proses pengajuan akreditasi LPH BBSPJPPI</p> <p>2] Proses asesmen awal dalam rangka akreditasi LPH BBSPJPPI oleh Tim Asesmen BPJPH telah dilaksanakan pada 15 sd 17 Februari 2023</p> <p>3] Pembahasan tindak lanjut hasil asesmen LPH BBSPJPPI pada 27 Februari 2023. Dokumen hasil tindak lanjut telah disampaikan kepada Tim Sesmen BPJPH pada 23 Maret 2023</p> <p>B2 :</p> <p>1] Pelaksanaan asesmen awal dalam rangka akreditasi LPH BBSPJPPI telah dilaksanakan pada 15 sd 17 Februari 2023 oleh Tim Asesor BPJPH</p> <p>2] Telah dilakukan pembahasan tindak lanjut atas hasil asesmen awal pengajuan akreditasi LPH BBSPJPPI pada 27 Februari 2023. Bukti tindak lanjut hasil asesmen telah disampaikan kepada Tim Asesor BPJPH pada tanggal 28 Februari 2023 dan menunggu hasil verifikasi dari BPJPH</p> <p>B3 :</p> <p>1] Pengajuan usulan sebagai Lembaga Verifikator Independen Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP sesuai Nota Dinas Kepala BSKJI kepada Menperin Nomor B/168/BSKJI/IND/III/2023 tanggal 3 Maret 2023</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>2] Identifikasi parameter yang akan diakreditasi</p> <p>3] Usulan parameter yang akan diakreditasi yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lab AK : Hg dalam garam - Lab Udara : ISBB (Indeks Suhu Bola Basah) , Kebisingan Ruang kerja , Intensitas Cahaya - Lab Instrumen : Logam Cd, Pb, Zn, Cu dan Ni pada air laut ; Logam Al pada air minum ; Boron pada air permukaan <p>4]Verifikasi dan validasi pengujian parameter yang akan diakreditasi.</p>
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62%	30 %	30 %	<p>1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan</p> <p>2] Pengisian aplikasi P3DN</p> <p>3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%</p> <p>4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan.</p>	<p>B1 :</p> <p>1] Mengidentifikasi potensi penggunaan PDN/TKDN pada kegiatan pengadaan barang/jasa;</p> <p>2] Penginputan data rencana pengadaan di aplikasi SIRUP LKPP;</p> <p>3] Melakukan tagging PDN di rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP;</p> <p>4] Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;</p> <p>5] Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon</p> <p>B2 :</p> <p>1] Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;</p> <p>2] Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon</p> <p>B3 :</p> <p>1] Mengajukan persetujuan penggunaan produk impor untuk peralatan pengujian, spare part, dan bahan-bahan untuk pengujian di laboratorium sesuai nota dinas nomor 170/BSKJI/BBSPJPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;</p> <p>2] Melaksanakan proses pengadaan</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	barang/jasa; 3] Penginputan data P3DN pada aplikasi Siswas P3DN BPKP 4] TKDN BBSPJPPI Bulan Januari-Maret 2023 sebesar 18,02 %.

Sasaran Strategis 3, mempunyai lima Indikator Kinerja yaitu

1. Indikator kinerja produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi.

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSPJ) dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BSPJ) dilingkungan BSKJI diantaranya BBSPJPPI dapat berperan sebagai penyedia jasa yang melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri.

Pada pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri), keberhasilan kerjasama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.

a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat OPTIKJI BSKJI Nomor 35/BSKJI.4/IND/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal data realokasi anggaran DAPATI TA 2023 ke Satker Daerah, BBSPJPI mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan DAPATI yang akan didanai di tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13 : Indikator Kinerja : Produktivitas/efisiensi perusahaan industry yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultasi.

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Performansi yang diukur	Anggaran (Rp.)	
				BSKJI	IKM
1	PT. Retota Sakti (Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol)	Industri Tenun dengan serat alam	Peningkatkan produktivitas kualitas tenun dengan proses pengeringan terkontrol	100.470.000	33.500.000
2	UD. Cap Batery (Konsultasi Optimalisasi proses produksi garam konsumsi beryodium dan garam aneka industri)	IKM Garam	Peningkatan kualitas produk garam dengan meningkatnya derajat keputihan	92.043.000	56.500.000

Pada triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini ditetapkan sebesar 10 %

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah:

1. Survey data teknis dan fisik
2. Penandatanganan SPK
3. Diskusi rencana penerapan teknologi.

Realisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut sd Triwulan I 2023 terlampir pada tabel di bawah ini :

Tabel 14 : realisasi fisik kegiatan DAPATI

No	Nama Perusahaan	% Realisasi Fisik	Realisasi Fisik
1	PT. Retota Sakti (Desain Instalasi pengolahan air limbah dan pendampingan sertifikasi ISO 9001 2015 IKM Ceriping Singkong)	10%	1. Diskusi internal terkait teknologi yang diaplikasikan 2. Penyusunan draft PKS 3. Survey data teknis dan identifikasi proses
2	UD Cap Batery (Konsultasi Optimalisasi proses produksi garam konsumsi beryodium dan garam aneka industri)	10%	1. Diskusi rencana penerapan teknologi 2. Penyusunan SPK 3. Survey lapangan untuk mendapatkan data teknis dan phisik.

Dari data diatas , perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

- Progres pelaksanaan kegiatan DAPATI hingga Triwulan I masih terbatas pada pelaksanaan identifikasi dan koordinasi awal dengan pihak IKM dan internal Tim DAPATI dalam rangka menentukan jadwal rencana kerja sekaligus penentuan design teknologi yang akan diterapkan.
- Atas pelaksanaan kegiatan DAPATI yang telah dijalankan, beberapa masih dalam proses pertanggungjawaban keuangan mengingat persetujuan DIPA atas realokasi anggaran kegiatan DAPATI 2023 baru ditetapkan pada 21 Februari 2023.

Tindak lanjut dari kendala diatas adalah

- Pelaksanaan kegiatan DAPATI sesuai jadwal rencana kerja yang disusun serta melakukan penyusunan pelaporan monev progres pelaksanaan secara berkala.
- Mempercepat proses pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dijalankan serta menyusun rencana penarikan kebutuhan anggaran kedepannya.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tahapan pelaksanaan kegiatan DAPATI hanya 9 bulan (Maret – November awal) sehingga perlu rencana kerja yang cermat agar sesuai timeline kegiatan .

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah setiap ketua Tim

mengkoordinasikan dan memonitoring agar kegiatan pelaksanaan DAPATI dapat berjalan sesuai dengan jadwal yg telah dibuat.

2. Indikator kinerja meningkatnya utilitas layanan jasa industri di dalam negeri.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSPJ) dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BSPJ) dilingkungan BSKJI adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan –kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBPNP.

Untuk mencapai target penerimaan PNBPNP yang telah ditetapkan, telah disusun rencana kinerja dimana pada Triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi capaian 25%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
2. Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
3. Pemberian jasa layanan teknis ke industri dalam negeri sesuai permintaan yang disepakati.
4. Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.

Adapun realisasi fisik dari kegiatan sampai Maret 2023 adalah

1. Update promosi untuk layanan jasa teknis baik offline maupun online
2. Koordinasi dengan pelanggan untuk pelunasan jasa layanan (reminder melalui surat resmi ke pelanggan).
3. Penyampaian penawaran dan layanan jasa sesuai permintaan.
4. Penerimaan PNBP BBSPJPPI sampai Maret 2023 : Rp 2.915.573.770,- (19,44%) dari target 100% (Rp 15.000.000.000,-)

Tabel 15 : Penerimaan PNBP dari Januari - Maret 2023

No	Penerimaan PNBP	Realisasi PNBP 2023 (Rp)
1	Bulan Januari	1.285.445.440
2	Bulan Februari	735.104.003
3	Bulan Maret	895.024.327
Total		2.915.573.770

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala

Perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja telah berhasil dicapai. Tetapi ada beberapa kendala yg mengakibatkan penerimaan PNBP BBSPJPPI masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbuan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
3. Ruang lingkup layanan pengujian masih terbatas.
4. Ruang lingkup layanan kalibrasi masih terbatas.
5. Beberapa perusahaan beralih ke laboratorium lain
6. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.

c Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan peningkatan penerimaan PNBP dari seluruh layanan jasa BBSPJPPI (tidak hanya terpaku penerimaan dari layanan pengujian), perlunya monitoring setiap bulan pihak manajemen terkait

kendala ataupun realisasi inovasi baik dari segi layanan, proses maupun penyelesaian keuangan terkait progres penagihan serta perlunya segera dilakukan peninjauan tarif BLU BBSPJPPI.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK dan komersialisasi produk inovasi teknologi
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
3. Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.
4. Segera dilakukan koordinasi tingkat internal Kemenperin (BSKJI dan Biro Keuangan) untuk memproses pengajuan usulan perubahan tarif jasa layanan BLU BBSPJPPI kepada Kementerian Keuangan.

3. Indikator kinerja meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri

Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan –kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

Pada indikator kinerja ini didapati capaian kinerja berdasarkan peningkatan realisasi layanan berdasarkan SPK/ Order PNBP pada tahun berjalan.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini adalah 25% dengan realisasi 25%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah

1. Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
2. Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan

3. Pemberian jasa layanan teknis ke industri dalam negeri sesuai permintaan yang disepakati.
4. Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI.

Realisasi fisik dari kegiatan sampai Maret 2023 adalah capaian realisasi layanan teknis berdasarkan jumlah transaksi/order dari periode bulan Januari sampai Maret berdasarkan data yang diambil dari SINDII sebanyak 830 transaksi order dengan pembagian :

- a. Transaksi layanan pengujian : 657 order
- b. Transaksi layanan Kalibrasi : 33 order
- c. Transaksi layanan sertifikasi :140 order

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik DLH maupun kompetitor.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJPI selama masa pandemi dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- 1 Meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK dan komersialisasi produk inovasi teknologi.
- 2 Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).

4. Indikator kinerja peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri.

Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Untuk mendukung operasional layanan, BBSPJPPI dilengkapi dengan sarana berupa Lembaga Penilaian Kesesuaian diantaranya laboratorium lingkungan yang terakreditasi KAN dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan (cair, udara, padat dan B3, biologi lingkungan); laboratorium aneka komoditi terakreditasi KAN; laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN; Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) terakreditasi oleh KAN; dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

Pengembangan lingkup jasa layanan teknis tersebut dilakukan secara bertahap, mengikuti perkembangan dan kebutuhan sektor industri. Dalam pelaksanaannya, untuk mendukung hal tersebut dilakukan pengembangan sumber daya, baik pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun pengembangan metode pengujian yang bertujuan untuk memperluas lingkup layanan dan meningkatkan kapasitas kemampuan layanan.

Menindaklanjuti perubahan Ortaker BBSPJPPI sebagaimana diamanatkan dalam Permenperin Nomor 1 Tahun 2022, kedepannya juga akan dilakukan pengembangan kelembagaan BBSPJPPI dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi sesuai SOTK BSKJI diantaranya melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan ruang lingkup makanan dan minuman, Lembaga Verifikasi Independen Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP. Disamping itu, turut dijajaki peluang peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri melalui pengajuan akreditasi perluasan ruang lingkup untuk layanan pengujian/kalibrasi/sertifikasi.

Pada Triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini 30 % dengan realisasi 30 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah

- 1 Penyiapan dokumen kelengkapan asesmen Lembaga Pemeriksa Halal
- 2 Pendampingan asesor pada asesmen Lembaga Pemeriksa Halal oleh BPJPH
- 3 Penyiapan dokumen tindak lanjut hasil asesmen LPH
- 4 Pengajuan usulan Penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Independen
- 5 Identifikasi peluang pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi

Realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pengajuan akreditasi LPH BBSPJPPI

- Proses asesmen awal dalam rangka akreditasi LPH BBSPJPPI oleh Tim Asesmen BPJPH telah dilaksanakan pada 15 sd 17 Februari 2023.
- Dokumen hasil tindak lanjut telah disampaikan kepada Tim Sesmen BPJPH pada tanggal 28 Februari 2023 dan saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari BPJPH.

b) Penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Independen

- Pengajuan usulan sebagai Lembaga Verifikator Independen Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP sesuai Nota Dinas Kepala BSKJI kepada Menperin Nomor B/168/BSKJI/IND/III/2023 tanggal 3 Maret 2023

c) Perluasan ruang lingkup layanan pengujian/kalibrasi/sertifikasi

Telah diidentifikasi peluang pengajuan perluasan lingkup akreditasi pengujian untuk parameter:

- Hg dalam garam (lab. pengujian aneka komoditi);
- ISBB (Indeks Suhu Bola Basah), Kebisingan Ruang kerja, Intensitas Cahaya (lab. pengujian udara);
- Logam Cd, Pb, Zn, Cu dan Ni pada air laut ; Logam Al pada air minum ; Boron pada air permukaan (lab. pengujian instrumen)

Atas rencana pengajuan perluasan ruang lingkup, telah dilakukan verifikasi dan validasi pengujian parameter yang akan diakreditasi.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan capaian rencana kinerja dengan realisasi sd Triwulan I 2023 telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Sesuai hasil asesmen saat pengajuan akreditasi LPH BBSPJPPI , untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan diperlukan pergantian personal Sumber Daya Syariah pada Organisasi LPH BBSPJPPI.

Proses pengajuan usulan sebagai Lembaga Verifikator Independen masih perlu melengkapi dokumen persyaratan.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah progres upaya peningkatan kapasitas dan lingkup layanan telah dijalankan sesuai rencana yang disusun.

Adapun rencana perbaikan untuk pelaksanaan di Triwulan selanjutnya adalah:

- 1 Pergantian/penunjukan personil Sumber Daya Syariah yang baru pada organisasi LPH BBSPJPPI.
- 2 Melengkapi dokumen persyaratan untuk penunjukan Lembaga Verifikator Independen (LVI) Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP.
- 3 Koordinasi dengan pihak wakil manajemen (WM) untuk pendaftaran pengajuan perluasan ruang lingkup akreditasi pengujian jika data dukung sudah terpenuhi kelengkapannya.

5. Indikator kinerja persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementrian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama meliputi akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dan /atau akun BLU 525121,525154,525153, 537112, dan 537113.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (R_{P3DN}) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

BBSPJPPI sebagai satker di bawah Kementerian Perindustrian berupaya dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Guna mendukung hal tersebut, telah disusun rencana kinerja yang mendukung pencapaian target penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BBSPJPPI tahun 2023. Pada Triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini ditetapkan sebesar 30% dengan realisasi 30%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah sebagai berikut:

- 1 Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan
- 2 Pengisian aplikasi P3DN
- 3 Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%
- 4 Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan
- 5 Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN
- 6 Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sd Triwulan I yaitu:

1. Telah dilakukan identifikasi potensi penggunaan PDN/TKDN pada kegiatan pengadaan barang/jasa pada DIPA BBSPJPPI TA 2023;
2. Telah dilakukan prose penginputan data rencana pengadaan di aplikasi SIRUP LKPP dengan melakukan tagging PDN di rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP.

3. Pengajuan persetujuan penggunaan produk impor untuk peralatan pengujian, spare part, dan bahan-bahan untuk pengujian di laboratorium sesuai nota dinas nomor 170/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
4. Penginputan data P3DN pada aplikasi Siswas P3DN BPKP
5. Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon untuk setiap realisasi belanja akun terpilih.

Berdasarkan monitoring capaian realisasi TKDN BBSPJPPI periode Januari-Maret berdasarkan data tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon diperoleh data capaian sebesar 18,02 %.

Tabel 16 : Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada akun 521211 ; 521219; 521811; 522192; 524114; 521111 ; 521131; 522141; 524119; 522131; 522191; 521241; 521841; 532111; 533111.

Pagu anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Import	% Realisasi PDN & TKDN
1.097.362.000	197.720.928	0	5.281.121	18,02

Sumber intranet kemenperin

Dari data di atas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target atas rencana kinerja telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- Proses penginputan data RUP pada aplikasi SIRUP membutuhkan waktu yang lama terutama di jam-jam kerja.
- Proses pengadaan peralatan uji laboratorium, bahan kimia , pengadaan perangkat inventaris perkantoran yang dipenuhi dari impor menunggu terbitnya persetujuan tertulis dari Menteri Perindustrian untuk proses ijin impornya.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terdapat kebijakan baru untuk proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenperin terkait pengadaan barang/jasa yang harus dipenuhi melalui impor yang perlu diantisipasi agar tidak menghambat waktu untuk proses pengadaan barang/jasa pada tahun berjalan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melakukan monitoring progres

penerbitan surat ijin impor dari Menperin dan melakukan persiapan penyusunan dokumen pengadaan agar proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai waktu/jadwal yang direncanakan sehingga hasil pengadaan dapat dimanfaatkan di tahun berjalan.

D. Sasaran Strategis IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

Tabel 17. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis 4 Triwulan I TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1.Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	15%	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	B1 : 1] Penyampaian ND Ka BBSPJPPI Nomor 11/BSKJI/BBSPJPPI/PR/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI Tahun 2023 2] Masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan BBSPJPPI Tahun 2023 B2 : 1] Sesuai hasil koordinasi awal dengan pihak Inspektorat III, sesuai rencana pelaksanaan audit kinerja periode 2023 pada satker BBSPJPPI dijadwalkan pada bulan September 2023

Indikator kinerja : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA 2023 target fisik dari indikator ini 15 % dengan realisasi 15 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I adalah:

- Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
- Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- Penyampaian ND Ka BBSPJPPI Nomor 11/BSKJI/BBSPJPPI/PR/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI Tahun 2023.
- Masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan BBSPJPPI Tahun 2022.
- Sesuai hasil koordinasi awal dengan pihak Inspektorat III, sesuai rencana pelaksanaan audit kinerja periode 2023 pada satker BBSPJPPI dijadwalkan pada bulan September 2023.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Tidak ada kendala.

c. Rekomendasi

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah koordinasi dengan bagian keuangan BBSPJPPI untuk penyiapan berkas dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan 2022 sebagai persiapan pelaksanaan audit kinerja.

E. Sasaran strategis V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan.

Tabel 18. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis 5 Triwulan I TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	3,65	25 %	25%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)	<p>B1 :</p> <p>1. Layanan satu pintu bagian Pengembangan Jasa Teknis BBSJPPI melalui Admin Balai No telpon. 024-8450651 HP. 0821 3452 5006, Web (bbspjppi.kemenperin.go.id), Email (bbspjppi.kemenperin@gmail.com), web (bbspjppi.kemenperin.go.id), desk layanan publik di loby/PC</p> <p>2. Evaluasi SPM Januari rata-2 SPM : 11, 25 hari (530 sampel)</p> <p>3. Tidak terdapat keluhan/complain layanan dari pelanggan.</p> <p>4. Penyebaran kuesioner sejumlah 121 pelanggan, kembali sebanyak 39 kuesioner</p> <p>B2 :</p> <p>1. Evaluasi SPM Januari rata-2 SPM : 10,55 hari (1008 sampel)</p> <p>2. Tidak terdapat keluhan/complain layanan dari pelanggan.</p> <p>3. Penyebaran kuesioner sejumlah 97 pelanggan, kembali sebanyak 22 kuesioner</p> <p>4. Hasil evaluasi penilaian Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)</p> <p>a. Nilai Indeks : A .</p> <p>b. IPP : 3,740 rata-2 indeks 93,508.</p> <p>c.. IPAK : 3,891 rata-2 indeks 97,277</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
							B3 : 1. Evaluasi SPM Januari rata-2 SPM : 10,55 hari (1549 Sampel) 2. Tidak terdapat keluhan/complain layanan dari pelanggan. 3. Penyebaran kuesioner sejumlah 97 pelanggan, kembali sebanyak 23 kuesioner 4. Hasil evaluasi penilaian Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) a. Nilai Indeks : A b. IPP : 3,648 rata-2 indeks 91,193. c. IPAK : 3,727 rata-2 indeks 93,182

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Target kinerja IKM menggunakan skala indeks 1-4 dengan kuesioner yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan format Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017.

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, BBSPJPPI setiap tahun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan pelanggan.

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan BBSPJPPI telah mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan , saran dan masukan.

Responden dari survei ini adalah pengguna layanan BBSPJPPI, baik perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan jasa di BBSPJPPI dan dipilih secara acak.

Pada triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

1. Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu
2. Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala
3. Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan
4. Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan
5. Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

Telah dilakukan pelayanan jasa teknis kepada pelanggan selama periode Januari dan Maret 2023 dimana dalam rangka pemantauan kualitas layanan telah dilakukan penyebaran kuesioner kepada 340 pelanggan dengan kuesioner yang kembali di Bulan Januari-Maret sebanyak 112 kuesioner yang masuk dimana setelah dievaluasi didapat nilai IKM sebesar 3,648 dan nilai indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,727. Selama periode Januari sd Maret tidak didapati adanya keluhan pelanggan.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target fisik rencana kinerja sd Triwulan I telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala

Ditinjau dari capaian realisasi fisik rencana kinerja, hingga saat ini masih belum ditemui kendala.

Namun dari sisi pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang jika diatasi dapat meningkatkan nilai IKM seperti : tingkat partisipasi/keterlibatan pelanggan dalam pengisian kuesioner IKM masih rendah (tingkat pengembalian kuesioner kepuasan pelanggan pada Triwulan I tercatat hanya sebesar 32,9%), informasi terkait fasilitas/ sarpras layanan dan upaya peningkatan layanan belum sepenuhnya terinformasi ke pelanggan sehingga mempengaruhi persepsi pelanggan dalam pengisian kuesioner.

c Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah selalu meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kualitas layanan agar capaian IKM bisa sesuai target dan dapat meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner yang telah diisi.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah

1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.
2. Lebih intensif dalam pemberian edukasi kepada pelanggan terkait layanan melalui WA, telepon, pada momen pelatihan, audit maupun sampling
3. Peningkatan kualitas layanan (layanan Prima)
4. Pelaksanaa supervisi pelaksanaan layanan secara berkala
5. Menjadwalkan acara business gathering sebagai jembatan informasi dan komunikasi dengan palanggan (rencana akan dilaksanan akhir bulan Juni 2023).

F. Sasaran Strategis VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang professional

Tabel 19. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis 6 Triwulan I TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya ASN BSKJI yang professional	1.Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	25%	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	B1 : 1. Telah disusun rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat structural TA 2023 2. Fasilitasi Pelatihan Teknis Penyegaran Skema Sertifikasi, SNI dan Proses Bisnis 3. Fasilitasi Pelatihan Teknis Analisa, Pengambilan Contoh dan Perhitungan Pengujian Sampel Udara (Emisi, Ambien, Kebisingan, ISBB) dan Jaminan Mutu. B2 : 1. Fasilitasi pelatihan udara TKBT (Tenaga Kerja Bangunan Tinggi) tingkat II di Indonesia Power. B3 : 1. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi PPC Lingkungan (Air dan Udara) 2. Fasilitasi persiapan pelatihan PPC Produk. 3. Pegawai BBSPJPPi yang sudah mengikuti workshop/Bimtek/Seminar/webinar Bulan Januari-Maret 2023 sebanyak 72 pegawai.

1. Indikator Kinerja : Rata-rata indeks profesionalitas ASN

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan

untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah:

- 1 Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural
- 2 Pelaksanaan workshop/Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai
- 3 Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala
- 4 Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

1. Telah disusun rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural periode TA 2023
2. Fasilitasi Pelatihan Teknis Penyegaran Skema Sertifikasi, SNI dan Proses Bisnis
3. Fasilitasi Pelatihan Teknis Analisa, Pengambilan Contoh dan Perhitungan Pengujian Sampel Udara (Emisi, Ambien, Kebisingan, ISBB) dan Jaminan Mutu.
4. Fasilitasi pelatihan udara TKBT (Tenaga Kerja Bangunan Tinggi) Tingkat II di PT Indonesia Power.
5. Fasilitasi pelatihan PPC produk
6. Pelaksanaan sertifikasi PPC Lingkungan (Air dan Udara)
7. Pegawai BBSPJPPI yang sudah mengikuti workshop/Bimtek/Seminar/webinar Bulan Januari-Maret 2023 sebanyak 72 pegawai.

b. Kendala

Belum tersedianya jadwal pelaksanaan untuk beberapa diklat/pelatihan peningkatan kompetensi SDM (struktural, fungsional dan pelatihan teknis) yang sesuai dengan kebutuhan program pelatihan yang telah disusun.

c. Rekomendasi

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah memfasilitasi diklat peningkatan kompetensi pegawai, mengkoordinir penyampaian realisasi dan bukti partisipasi pelatihan personil secara berkala, memfasilitasi penerbitan sertifikat untuk pelatihan yang diselenggarakan internal (in house training), monitoring jadwal

pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara dan pendaftaran pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pengembangan layanan dan peningkatan indeks profesionalitas ASN satker BBSPJPPI.

G. Sasaran strategis VII : Penguatan Layanan Publik.

Tabel 20. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis 7 Triwulan I TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,51	30	20	<p>1] Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik)</p> <p>2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDi.</p> <p>3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala.</p> <p>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan</p> <p>5] Update dan upload informasi jasa layanan BBSPJPPI melalui medsos secara berkala dan setiap saat.</p> <p>6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin</p> <p>7] Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik (bimtek/study banding)</p>	<p>B1 :</p> <p>1. Belum dilakukan penyusunan /draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) masih menggunakan SK 2023, (Belum terlaksana, menunggu menunggu pelantikan Ka. Balai).</p> <p>2. Pengembangan dashboard SINDi modul HALAL</p> <p>3. Update informasi layanan publik; website (berkala), pembuatan video e-training (proses), update medsos (berkala dan setiap waktu kegiatan BBSPJPPI).</p> <p>4. Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin (terjadwal dari Kemenperin).</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
							<p>B2 :</p> <p>1. Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) masih menggunakan SK 2023, (Belu terlaksanan, menunggu menunggu pelantikan Ka. Balai).</p> <p>2. Pengembangan dashboard SINDi modul HALAL dan update modul e-training</p> <p>B3 :</p> <p>1.Peningkatan kompetensi SDM : pelatihan penyusunan Daftar Informasi Kearsipan (DIK), Daftar Informasi Publik (DIP), web programing (rencana bulan April 2023)</p> <p>2.Pendaftaran produk AiMS pada kanal mic.kemenperin.go.id</p>

1. Indikator Kinerja : Nilai minimal indeks layanan publik

Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI. Pelayanan publik sesuai Permenpan RB No 17 Tahun 2017 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang undangan setiap warga Negara dan penduduk

atas barang, jasa dan /atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 30 % dengan realisasi 20%.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

- Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik)
- Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi.
- Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala.
- Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan.
- Update dan upload informasi jasa layanan BBSPJPI melalui medsos secara berkala dan setiap saat.
- Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin
- Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik (bimtek/study banding).

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

- Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) masih menggunakan SK 2023, (Belum terlaksana, menunggu menunggu pelantikan Ka. Balai).
- Pengembangan dashboard SINDIi modul HALAL dan update modul e-training.
- Peningkatan kompetensi SDM : pelatihan penyusunan Daftar Informasi Kearsipan (DIK), Daftar Informasi Publik (DIP), web programing (rencana bulan April 2023).
- Pendaftaran produk AiMS pada kanal mic.kemenperin.go.id

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target tidak berhasil dilaksanakan.

a. Kendala

- SK-SK terkait layanan publik belum diterbitkan/update
- Belum semua fitur pada sistem layanan mengakomodir kebutuhan pelanggan dan pegawai di balai.
- Sistem pendokumentasian/ pengarsipan yang masih belum terintegrasi
- Terbatasnya SDM di bidang IT.
- Kurangnya pemahaman pelanggan dalam penggunaan sistem informasi yang sudah disediakan.
- Penyelesaian pengembangan platform sistem jasa layanan membutuhkan waktu cukup lama (Masih tergantung pada eksternal)

b. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sudah menyiapkan konsep SK-SK yang akan diterbitkan menunggu pergantian Kepala Balai yang baru , mengarsip dokumen penawaran dengan baik serta lengkap dan tersimpan secara softfile.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- Pengembangan sistem informasi yang user friendly bagi pelanggan dalam mengakses jasa layanan balai.
- Pengembangan website yang lebih informatif dan mudah diakses.
- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung IT.
- Pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir seluruh jasa layanan di balai.
- Perkuat Sistem layanan 1 pintu
- Monitoring dan evaluasi kepada pelanggan yang memberikan penilaian IKM rendah.
- Pendokumentasian arsip yang terintegrasi.
- Pengembangan kapabilitas-kompetensi SDM di bidang IT

H. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Tabel Tabel 21. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis 8 Triwulan I TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,5	30%	30%	<p>1] Penyusunan dokumen Tapkin</p> <p>2] Penyusunan dokumen Renkin</p> <p>3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I)</p> <p>4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021</p>	<p>B1 :</p> <p>1] Telah dilakukan penyusunan dan penyampaian usulan dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPPI TA 2023 sesuai ND Ka BBSPJPPI Nomor 12/BSKJI/BBSPJPPI/PR/I/2023 tanggal 12 Januari 2023.</p> <p>2] Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renkin) TA 2024 sebagai dasar acuan pengajuan usulan anggaran BBSPJPPI TA 2024. Dokumen Renkin BBSPJPPI TA 2024 telah disusun pada 27 Januari 2023 dengan besaran pengajuan usulan anggaran sebesar Rp. 38.965.780.000,-</p> <p>3] Pengumpulan data capaian kinerja bulanan dan pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Smart DJA, eMonev Bappenas)</p> <p>B2 :</p> <p>1] Telah dilakukan penyesuaian usulan dokumen Tapkin/Perkin BBSPJPPI TA 2023 sesuai hasil masukan bagian Program Sekretariat BSKJI. Dokumen Tapkin/Perkin BBSPJPPI TA 2023 telah disetujui dan ditandatangani pada 10 Februari 2023</p> <p>2] Pengumpulan data capaian kinerja bulanan dan pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Smart DJA, eMonev Bappenas)</p> <p>B3 :</p> <p>1] Telah dilakukan penyiapan dokumen kelengkapan bukti tindak</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>lanjut hasil evaluasi SAKIP periode 2021</p> <p>2] Telah dilakukan penyiapan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP periode 2023 pada satker BBSPJPPI</p> <p>3] Pelaksanaan koordinasi persiapan evaluasi SAKIP Satker BSKJI Tahun 2023 pada 16 Maret 2023</p> <p>4] Koordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP pada satker BBSPJPPI</p> <p>5] Pengumpulan data capaian kinerja bulanan dan pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Smart DJA, eMonev Bappenas)</p> <p>6] Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PP 39 Triwulan I 2023</p>
		2.Nilai minimal laporan keuangan	95	35%	35%	<p>1] Penyusunan laporan keuangan unaudited untuk pelaporan keuangan periode tahun sebelumnya</p> <p>2] Koordinasi penyusunan laporan keuangan unaudited dengan bagian keuangan Ses BSKJI</p> <p>3] Review laporan keuangan oleh Itjen</p> <p>4] Pelaksanaan audit laporan keuangan unaudited oleh KAP</p>	<p>B1 :</p> <p>1] Penyiapan dokumen dan kelengkapan untuk audit laporan keuangan BLU 2023 oleh KAP</p> <p>2] Rekonsiliasi SAKTI dan OMSPAN data keuangan</p> <p>3] Mengikuti pra workshop penyusunan LK BSKJI 2023 pada 19 Januari 2023</p> <p>4] Mengikuti workshop penyusunan LK BSKJI 2023 pada 31 Januari sd 2 Februari 2023</p> <p>5] Penyusunan laporan keuangan unaudited 2023 dan data dukung laporan</p> <p>6] Telah dilakukan penunjukan KAP Ashari & Ida Nurhayati untuk proses audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2023 berdasarkan SPK Nomor 58/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/II/2023 tanggal 13 Februari 2023</p> <p>7] Pelaksanaan dan penilaian PIPK satker BBSPJPPI periode tahun 2023.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
				Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
							B2 : 1] Pembukaan audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2023 oleh KAP pada 13 Februari 2023 2] Pengumpulan kelengkapan permintaan data audit BPK 3] Pelaksanaan review atas laporan keuangan unaudited 2023 oleh Tim Inspektorat III pada 20-24 Februari 2023 4] Catatan atas Laporan Keuangan BBSPJPPI 2023 (Unaudited) telah disusun dan disampaikan ke Biro Keuangan pada 17 Februari 2023 B3 : 1] Closing Meeting audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2023 oleh KAP pada 24 Maret 2023 2] Pengisian Capaian Output periode bulan Jan-Feb pada aplikasi SAKTI.

Pada Sasaran Strategis 8 terdapat 2 indikator kinerja yakni:

i. Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingkungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Pada tahun 2023, pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SAKIP 2022 dengan mengacu pada ketentuan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pelaksanaan rencana kegiatan yang mendukung pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja satker BBSPJPPI selama periode Triwulan I 2023 diantaranya melalui penyiapan dokumen pengukuran kinerja tahun berjalan, penyusunan dokumen perencanaan kinerja untuk mendukung proses penganggaran periode tahun berikutnya, proses pelaporan kinerja Triwulan I serta evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja periode tahun sebelumnya.

Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 30 % dengan realisasi capaian sebesar 30 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

- Penyusunan dokumen Tapkin
- Penyusunan dokumen Renkin
- Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I)
- Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- 1) Telah dilakukan penyusunan dan penyampaian usulan dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPPI TA 2023 sesuai ND Ka BBSPJPPI Nomor 12/BSKJI/BBSPJPPI/PR/I/2023 tanggal 12 Januari 2023
- 2) Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renkin) TA 2024 sebagai dasar acuan pengajuan usulan anggaran BBSPJPPI TA 2024. Dokumen Renkin BBSPJPPI TA 2024 telah disusun pada 27 Januari 2023 dengan besaran pengajuan usulan anggaran sebesar Rp. 38.965.780.000,-
- 3) Telah dilakukan penyesuaian usulan dokumen Tapkin/Perkin BBSPJPPI TA 2023 sesuai hasil masukan bagian Program Sekretariat BSKJI. Dokumen Tapkin/Perkin BBSPJPPI TA 2023 telah disetujui dan ditandatangani pada 10 Februari 2023
- 4) Telah dilakukan penyiapan dokumen kelengkapan bukti tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode 2021

- 5) Telah dilakukan penyiapan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP periode 2023 pada satker BBSPJPPI
- 6) Pelaksanaan koordinasi persiapan evaluasi SAKIP Satker BSKJI Tahun 2023 pada 16 Maret 2023
- 7) Koordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP pada satker BBSPJPPI
- 8) Pengumpulan data kinerja periode bulan Januari sd Maret sebagai bahan pelaporan akuntabilitas kinerja Triwulan I 2023.
- 9) Pengisian Aplikasi e-Monev (Smart DJA Kemenkeu dan e-Monev Bappenas) periode bulan Januari sd Maret.
- 10) Telah dilakukan progres penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PP 39 Triwulan I 2023.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target maka rencana aksi kegiatan telah seluruhnya dilakukan sesuai rencana yang ditetapkan.

b. Kendala

Dengan penilaian SAKIP tahun 2023 mengacu pada ketentuan terbaru yang diatur dalam PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021, masih terdapat kendala terkait kelengkapan dokumen pendukung penilaian yang belum tersedia sampai batas akhir waktu upload yang ditetapkan Tim Evaluator Inspektorat III.

c. Rekomendasi

Atas kendala yang dihadapi tersebut, rencana perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya komunikasi dan penyampaian kelengkapan dokumen yang belum tersedia sebelumnya pada saat pelaksanaan klarifikasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III.

Sementara itu, untuk pelaksanaan periode Triwulan selanjutnya perlu disiapkan dokumen tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP 2022 satker BBSPJPPI. Disamping itu, untuk tetap melakukan monitoring progres capaian realisasi kinerja secara berkala dan melaporkan progres kinerja secara tepat waktu.

ii. Nilai minimal Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional(LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metode penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

BBSPJPPI adalah satker yang wajib menyusun laporan keuangan sebagai upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Laporan Keuangan BBSPJPPI telah disusun secara berkala yaitu laporan audited tahun pelaporan sebelumnya, laporan semester tahun berjalan, laporan triwulan III tahun berjalan, dan laporan akhir tahun tahun berjalan(anaudited).

Pada triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 35 % dengan realisasi 35 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

- Penyusunan laporan keuangan unaudited untuk pelaporan keuangan periode tahun sebelumnya

- Koordinasi penyusunan laporan keuangan unaudited dengan bagian keuangan Ses BSKJI
- Review laporan keuangan oleh Itjen
- Pelaksanaan audit laporan keuangan unaudited oleh KAP

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu

- Penyiapan dokumen dan kelengkapan untuk audit laporan keuangan BLU 2022 oleh KAP
- Rekonsiliasi SAKTI dan OMSPAN data keuangan
- Mengikuti pra workshop penyusunan LK BSKJI 2022 pada 19 Januari 2023
- Mengikuti workshop penyusunan LK BSKJI 2022 pada 31 Januari sd 2 Februari 2023
- Penyusunan laporan keuangan unaudited 2022 dan data dukung laporan.
- Telah dilakukan penunjukan KAP Ashari & Ida Nurhayati untuk proses audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2022 berdasarkan SPK Nomor 58/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
- Pelaksanaan dan penilaian PIPK satker BBSPJPPI periode tahun 2022.
- Pembukaan audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2022 oleh KAP pada 13 Februari 2023
- Pengumpulan kelengkapan permintaan data audit BPK
- Pelaksanaan review atas laporan keuangan unaudited 2022 oleh Tim Inspektorat III pada 20-24 Februari 2023
- Catatan atas Laporan Keuangan BBSPJPPI 2022 (Unaudited) telah disusun dan disampaikan ke Biro Keuangan pada 17 Februari 2023
- Closing Meeting audit laporan keuangan BLU BBSPJPPI 2022 oleh KAP pada 24 Maret 2023.
- Pengisian Capaian Output periode bulan Jan-Feb pada aplikasi SAKTI

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Tidak ada kendala.

c. Rekomendasi

Rencana perbaikan triwulan selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan audited 2022 dengan mempertimbangkan masukan masukan hasil audit laporan dari Tim Inspektorat III dan KAP.

3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada kinerja *Output* Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA BBSPPPI TA 2023 sampai dengan Triwulan I 2023, capaian realisasi keuangan sebesar 18,13% dan capaian realisasi fisik sebesar 23,65%. Capaian realisasi keuangan masih di bawah target realisasi yang ditetapkan BSKJI dimana realisasi keuangan ditetapkan sebesar 20,35%. Sedangkan capaian realisasi fisik juga tidak mencapai target yang ditetapkan BSKJI sebesar 25%. Secara lebih jelas capaian realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana berikut:

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang didalamnya mencakup pelaksanaan/operasional pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri meliputi penyelenggaraan jasa pelayanan teknis pengujian, pelayanan teknis kalibrasi, pelayanan teknis sertifikasi, pelayanan pelatihan teknis, pelayanan inspeksi teknis, pelayanan optimasi pemanfaatan teknologi dan pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/workshop/layanan.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan/operasional layanan seperti diantaranya belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan layanan (sampling, audit sertifikasi, supervisi kerjasama Litbang, pelatihan teknis dan inspeksi teknis), belanja jasa (pemeliharaan akreditasi lembaga Penilaian Kesesuaian, biaya kalibrasi peralatan, pengujian Subkon, sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi peralatan untuk sampling, transport Limbah B3) serta belanja barang dan barang persediaan (pembelian bahan kimia dan bahan penolong, pengadaan peralatan gelas, perlengkapan sampling, penggantian sparepart peralatan dll).

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Kegiatan I realisasi fisik dan keuangan

<i>Klasifikasi Rincian Output (KRO)</i>		Pagu (Rp 000)	Triwulan I			
			Keuangan		Fisik	
			S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	255.070	0.45	0.45	22.50	27.00
BAD	Pelayanan publik kepada industri	7.333.900	25.25	25.53	26.24	27.14
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.354.000	-	-	25.00	28.00
QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192.513	-	-	8.96	8.28

a) Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri hanya memiliki 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yakni:

1. KRO 6077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi

Sampai Triwulan I , total realisasi keuangan tidak mencapai target BSKJI sedangkan realisasi fisiknya mencapai sasaran dan target BSKJI.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah :

- 1 Rapat tim promosi (Program dan pelaksanaan kegiatan tim promosi)
- 2 Identifikasi pelanggan, pembuatan bahan promosi (brosure-profile BBSPJPPI dan booklet AiMS)
- 3 Pembuatan/penyiapan bahan promosi (profile dan boocket AiMS)
- 4 Rapat internal persiapan pelaksanaan kegiatan Pemasaran, Promosi, Publikasi dan Pembinaan Hubungan Pelanggan Layanan Teknis
- 5 Koordinasi pelaksanaan Pembuatan Video Profil Dan Layanan dan Banner Layanan BBSPJPPI

2. KRO 6077.BAD Pelayanan Publik kepada industri

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan dan fisik telah mencapai sasaran

yang ditetapkan BSKJI.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah:

- Pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan kerjasama pemantauan lingkungan.
- Pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel untuk pengujian air limbah, udara emisi, dan produk (dalam rangka penerbitan SPPT SNI) untuk periode Januari sd Maret 2023.
- Pelaksanaan pengujian subkon untuk parameter pengujian yang belum dapat dilakukan di laboratorium BBSPJPPI
- Pengadaan bahan kimia, bahan penolong, sparepart untuk mendukung operasional layanan pengujian.
- Pelaksanaan jasa layanan berupa audit sertifikasi dalam rangka penerbitan SPPT SNI, pelaksanaan layanan kalibrasi, pelatihan teknis SDM industri, serta supervisi dalam rangka pelaksanaan kerjasama optimalisasi pemanfaatan teknologi.

3. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Sampai Triwulan I masih belum terdapat realisasi keuangan. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan telah mencapai sasaran rencana kegiatan yang direncanakan dan telah memenuhi target BSKJI.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah:

- Mengidentifikasi kebutuhan alat lab (spesifikasi teknis) yang diperlukan
- Menyusun spesifikasi teknis peralatan berdasarkan kebutuhan dari laboratorium
- Penyusunan rencana kerja pengadaan peralatan laboratorium pengujian
- Mengajukan ijin pengadaan alat impor kepada Menteri Perindustrian dimana telah disampaikan sesuai Nota Dinas Nomor 170/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023

4. KRO 6077.QDI Sosialisasi dan Diseminasi

Sampai Triwulan I untuk realisasi keuangan belum ada realisasinya. Sedangkan untuk realisasi fisik tidak mencapai sasaran dan juga target dari BSKJI.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

- Identifikasi awal proses di industri dan pembahasan konsep kerjasama PT Retota Sakti.
- Pengumpulan data proses pengeringan di unit proses PT Retota Sakti.
- Penandatanganan SPK, sampling dan diskusi rencana kerja UD Cap Batery.

b) Kendala

1. KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi
 - Pelaksanaan kegiatan Business Gathering sesuai perencanaan baru dijadwalkan untuk dilaksanakan pada bulan Juni 2023.
2. KRO 6077 CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
 - Dikarenakan pemenuhan pengadaan peralatan uji GCMS melalui impor, untuk proses pengadaannya masih menunggu terbitnya surat ijin impor dari Menperin dimana proses pengajuan persetujuan penggunaan produk impor untuk peralatan pengujian telah disampaikan sesuai nota dinas nomor 170/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023
 - Pengadaan peralatan uji laboratorium berupa unit GCMS menggunakan sumber anggaran PNPB tahun berjalan, sehingga dalam realisasi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan anggaran berdasarkan capaian realisasi penerimaan PNPB tahun berjalan.
3. KRO 6077 QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri
 - Progres pelaksanaan kegiatan DAPATI hingga Triwulan I masih terbatas pada pelaksanaan identifikasi dan koordinasi awal dengan pihak IKM dan internal Tim DAPATI dalam rangka menentukan jadwal rencana kerja sekaligus penentuan design teknologi yang akan diterapkan
 - Atas pelaksanaan kegiatan DAPATI yang telah dijalankan, beberapa masih dalam proses pertanggungjawaban keuangan mengingat persetujuan DIPA atas realokasi anggaran kegiatan DAPATI 2023 baru ditetapkan pada 21 Februari 2023.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggung jawaban keuangan atas realisasi kegiatan yang sudah dijalankan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya diantaranya dengan:

- Mereview ulang terkait jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan Business Gathering terkait penentuan tema pelaksanaan kegiatan, rundown acara serta Narasumber pada pelaksanaan kegiatan.
- Monitoring progres penerbitan surat izin impor dari Menperin
- Monitoring capaian realisasi penerimaan PNPB dan menyusun rencana proyeksi belanja dalam rangka pengalokasian pendanaan untuk pelaksanaan tender peralatan uji laboratorium.
- Penyiapan dan penyusunan dokumen pengadaan untuk persiapan pelaksanaan tender pengadaan peralatan uji laboratorium.
- Pelaksanaan kegiatan DAPATI sesuai jadwal rencana kerja yang disusun serta melakukan penyusunan pelaporan monev progres pelaksanaan secara berkala.
- Mempercepat proses pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dijalankan serta menyusun rencana penarikan kebutuhan anggaran kedepannya.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen yang didalamnya mencakup pengelolaan data dan informasi, pengelolaan majalah /jurnal ilmiah , pelaksanaan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana prasarana, perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja, pengelolaan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi serta pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan

Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja keperluan perkantoran, belanja gaji dan honor (operasional satuan kerja, honor output kegiatan, honorarium karyawan kontrak, honor pengelolaan jurnal JRTPPI), belanja barang persediaan (pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga perkantoran), biaya langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet), perjalanan dinas (perjadin pimpinan), belanja pemeliharaan sarpras, belanja jasa (pemeliharaan SMM balai, maintenance jaringan, biaya pelatihan teknis SDM) serta belanja modal (pengadaan sarpras perkantoran, pengembangan sistem informasi).

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23: Kegiatan II Realisasi Fisik dan Keuangan

<i>Klasifikasi Rincian Output (KRO)</i>		Pagu (Rp 000)	s/d Triwulan I			
			Keuangan		Fisik	
			S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.270.143	19.18	19.18	25.09	22.70
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	170.165	-	-	-	-
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	583.510	11.07	11.07	13.26	13.48
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	210.785	20.95	20.95	37.59	41.21

a. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

- 1) KRO 6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan mencapai sasaran. Tetapi untuk total realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

Baik total realisasi baik fisik maupun keuangan tidak mencapai target BSKJI. Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum dalam Bulan Januari -Maret 2023 adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN , Operasional perkantoran dan pimpinan, Pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, pemeliharaan kendaraan operasional, pemeliharaan alat laboratorium, pemeliharaan sarana kantor, pengadaan bahan Makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh, penyelenggaraan poliklinik, pengelolaan jaringan data, pelaksanaan pemasaran dan pengelolaan majalah/jurnal ilmiah dan publikasi.

2) KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan dan fisik belum ada realisasinya.

3) KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan dan realisasi fisik mencapai sasaran tetapi tidak memenuhi target keuangan dan target fisik BSKJI.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis ASN, jabatan fungsional dan pelatihan teknis, Koordinasi rekrutmen PPPK tahun 2023, Usulan Pengangkatan dan Pelantikan CPNS 2022, Usulan DUPAK Fungsional Tertentu, Pembaruan Data Kepegawaian.

4) KRO 6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan dan total realisasi fisik mencapai sasaran.

Demikian pula mencapai target BSKJI baik fisik maupun keuangan.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan PP 39 triwulan I, koordinasi penyusunan laporan keuangan tahun berjalan , dan pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan BBSPJPI.

b. Kendala

1. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

- Dikarenakan pemenuhan pengadaan perangkat inventaris perkantoran sebagian dipenuhi melalui impor, untuk proses pengadaannya masih menunggu terbitnya surat ijin impor dari Menperin dimana proses pengajuan persetujuan penggunaan produk

impor untuk peralatan pengujian telah disampaikan sesuai nota dinas nomor 170/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

2. KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

- Belum tersedianya jadwal pelaksanaan diklat/pelatihan peningkatan kompetensi SDM (struktural, fungsional dan pelatihan teknis) yang sesuai dengan kebutuhan program pelatihan.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan pengadaan terkait jenis peralatan inventaris perkantoran dan perangkat pengolah data dibuat prioritas kebutuhan yang mendesak. Dimana prioritas utama pada pengadaan alat GCMS.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah

- KRO 6042. EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 1 Monitoring progres penerbitan surat ijin impor dari Menperin
 - 2 Segera dilakukan penyusunan dokumen pengadaan untuk persiapan pelaksanaan pengadaan perangkat inventaris perkantoran
- KRO 6042. EBC Layanan Manajemen SDM Internal
 - 1 Monitoring jadwal pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara dan pendaftaran pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pengembangan layanan dan peningkatan indeks profesionalitas ASN satker BBSPJPPI.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

3.2.1 Hambatan/Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin)

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin) Triwulan I T.A. 2023 terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi dalam pencapaian realisasi kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Berkaitan dengan target kinerja produktifitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi, sampai periode triwulan I masih belum mendapatkan partner untuk pelaksanaan kegiatan kolaborasi.
- Berkaitan dengan penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 Penetapan target kinerja untuk indikator kinerja ini sebanyak 5 (lima) perusahaan, dimana sampai Triwulan I baru tercapai 2 (dua) perusahaan.

Pada realisasi kerjasama Optimalisasi dan Pendampingan IPAL dengan PT Mirasa Food Industry terkendala proses penyiapan lahan (cut and fill) memerlukan waktu cukup lama sehubungan kendala teknis ketersediaan peralatan pendukung.

- Berkaitan dengan meningkatnya PNBP layanan jasa industri

Adanya indikasi berkurangnya jumlah pelanggan pengujian BBSPJPPI yang berdampak pada capaian realisasi PNBP. Penerimaan PNBP atas realisasi pemberian jasa layanan teknis BBSPJPPI sampai periode Triwulan I baru tercapai sebesar Rp. 2.915.573.770,- (19,44%) dari target penerimaan tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- sesuai kontrak kinerja BLU dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

- Berkaitan dengan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Mayoritas pemenuhan bahan kimia dan peralatan uji untuk mendukung operasional layanan pengujian masih bergantung melalui impor. Proses pengadaan bahan kimia dan bahan penolong serta pengadaan peralatan uji laboratorium melalui impor dalam pelaksanaannya harus menunggu terbitnya persetujuan tertulis dari Menteri Perindustrian untuk proses ijin impornya.

Sampai Triwulan I, capaian TKDN BBSPJPPI sebesar 18,02 %.

- Berkaitan dengan peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industry di dalam negeri

Sesuai hasil asesmen Lembaga Pemeriksa Halal oleh BPJPH, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan diperlukan pergantian personil Sumber daya Syariah pada organisasi LPH BBSPJPPI.

- Berkaitan dengan nilai minimal akuntabilitas kinerja

Masih terdapat kelengkapan dokumen penilaian SAKIP yang belum tersedia sampai dengan batas akhir waktu upload dokumen yang ditetapkan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III.

3.2.2 Hambatan/Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Dalam pelaksanaan output kegiatan triwulan I T.A. 2023 masih terdapat beberapa kendala antara lain sebagai berikut :

- Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Business gathering

Pelaksanaan kegiatan Business gathering sesuai perencanaan baru dijadwalkan Bulan juni 2023.

- Berkaitan dengan pengadaan peralatan uji laboratorium berupa GCMS
Pengadaan peralatan tersebut menggunakan sumber anggaran PNBPN yang realisasi pelaksanaannya memerlukan kepastian ketersediaan anggaran terlebih dahulu yang berasal dari realisasi penerimaan PNBPN tahun berjalan.
Dikarenakan pemenuhan alat tersebut melalui impor sehingga untuk proses pengadaannya memerlukan ijin impor dari Menteri perindustrian.
- Berkaitan dengan realisasi keuangan yang masih rendah pada kegiatan pelaksanaan DAPATI
Pelaksanaan kegiatan DAPATI yang telah dijalankan, beberapa masih dalam proses pertanggungjawaban keuangan mengingat persetujuan DIPA atas realokasi anggaran kegiatan baru ditetapkan 21 Februari 2023.
Progress pelaksanaan DAPATI Triwulan I masih terbatas pelaksanaan identifikasi dan koordinasi awal dengan pihak IKM dan internal Tim DAPATI.
- Realisasi penerimaan PNBPN sd Triwulan I TA 2023 masih belum optimal dengan tingkat capaian realisasi 19,44%. Tingkat capaian realisasi penerimaan PNBPN berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran yang bersumber dari anggaran PNBPN.

3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT

3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kinerja TA 2023 selanjutnya sebagai berikut :

- Terkait belum terdapat patner kolaborasi pada produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi maka perlu koordinasi dan promosi terhadap industry dan akademisi agar bersedia kolaborasi dengan BBSPJPPI.
Menghubungi kembali (follow up) industry yang pernah berkonsultasi terkait permasalahan IPAL dengan BBSPJPPI.
Untuk pihak akademisi berkomunikasi lebih intens dengan universitas-universitas di Semarang / yang pernah kerjasama dengan BBSPJPPI.
- Berkaitan dengan peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
Pada pelaksanaan kerjasama dengan PT Mirasa Food Industry, memantau kelanjutan pembangunan IPAL sesuai desain dengan pelaksanaan supervisi oleh Tim kerjasama secara berkala.

Peningkatan promosi baik melalui media elektronik, non elektronik maupun tatap muka terkait layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi maupun layanan pelatihan/pendampingan penerapan standart industri.

- Berkaitan dengan peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industry di dalam negeri
Telah dilakukan pergantian/penunjukan personil Sumber Daya Syariah yang baru pada organisasi LPH BBSPJPPI.
Melengkapi dokumen persyaratan untuk penunjukkan Lembaga Verifikator Independen (LVI) Perhitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP.
- Untuk mendorong peningkatan realisasi penggunaan PDN dalam DIPA BBSPJPPI kedepannya akan dilakukan identifikasi produsen bahan kimia dalam negeri dan peralatan laboratorium uji yang berTKDN. Selain itu dalam proses pengadaan barang/jasa akan memanfaatkan informasi terkait produk dalam negeri/PDN, TKDN pada website P3DN, e-catalog sebelum mengajukan pengadaan.
Melakukan pemantauan atas penerbitan persetujuan impor dari Menteri Perindustrian, yang telah diajukan sesuai Nota Dinas nomor 170/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023. Setelah diperoleh persetujuan impor agar segera ditindaklanjuti dengan proses pengadaan baik melalui tender dengan berkoordinasi dengan UKPBJ Kemenperin maupun yang prosesnya melalui pengadaan langsung. Dengan demikian hasil proses pengadaan barang dapat dimanfaatkan pada tahun berjalan guna mendukung operasional layanan BBSPJPPI.
- Terkait nilai minimal akuntabilitas kinerja
Berkomunikasi dan menyampaikan kelengkapan dokumen yang belum tersedia pada saat batas akhir waktu upload pada saat klarifikasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2022 agar segera disusun tindak lanjut sesuai hasil rekomendasi Tim Evaluator sebagai bahan kelengkapan evaluasi SAKIP periode selanjutnya.

3.3.2 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan kinerja kegiatan TA 2023 pada periode Triwulan selanjutnya sebagai berikut:

- Mereview ulang terkait jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan Business Gathering terkait penentuan tema pelaksanaan kegiatan, rundown acara serta narasumber.
- Memonitoring penerbitan surat ijin impor dari Menperin.
- Koordinasi dan memonitoring kegiatan DAPATI agar sesuai jadwal kerja yang disusun.
- Mengoptimalkan upaya penerimaan PNBPN melalui pengembangan kapasitas jasa layanan (pengembangan lingkup layanan baru diantaranya sertifikasi halal, verifikasi GRK, verifikasi TKDN, uji profisiensi) serta peluang sumber penerimaan baru dengan mendorong komersialisasi produk inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPI (teknologi AiMS, dll).
- Melakukan monitoring piutang dan penyelesaian tagihan pembayaran piutang atas jasa layanan untuk memperlancar cash flow dan memberi kelonggaran operasional kegiatan yang bersumber dari sumber anggaran PNBPN.
- Monitoring jadwal pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara dan pendaftaran pelaksanaan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi SDM.

BAB. IV

P E N U T U P

Laporan Triwulan I ini merupakan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan satker BBSPJPI selama periode Triwulan I, yang merupakan penjabaran dari rencana kegiatan Triwulan I TA 2023. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I ini masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya. Demikian pula capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan yang masih di bawah target yang ditetapkan BSKJI.

Pada pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa permasalahan di dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut diperlukan adanya evaluasi serta koordinasi intens seluruh pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan di triwulan selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

LAMPIRAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi	: (247161) BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi	: 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi	: 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program	: 04.07.EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
5. Indikator Hasil	:
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan	: 6077 - Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke	: 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan	: Dr Sidik Herman
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan	: Jl. Kimangunsarkoro No. 6
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA	: SP DIPA-019.07.2.247161/2023

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
AEF Sosialisasi dan Diseminasi		-	255,070	255,070	Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	100 orang
BAD Pelayanan Publik kepada industri		-	7,333,900	7,333,900	Jumlah Industri yang mendapatkan Layanan Jasa	794 Industri
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		-	3,354,000	3,354,000	Jumlah Sarana Peralatan dan Mesin untuk menunjang workshop/layanan/lab	1 Unit
QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri		-	192,513	192,513	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan industri	2 Industri, IKM, Miliar USD
Total		-	11,135,483	11,135,483		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	-	-	-	-	0.45	0.45	22.50	27.00	0.45	0.45	22.50	27.00	JAWA TENGAH
BAD Pelayanan Publik kepada industri	-	-	-	-	25.25	25.53	26.24	27.14	25.25	25.53	26.24	27.14	JAWA TENGAH
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	25.00	28.00	-	-	25.00	28.00	JAWA TENGAH
QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	-	-	-	-	-	-	8.96	8.28	-	-	8.96	8.28	JAWA TENGAH
Jumlah	-	-	-	-	5.73	5.79	8.77	9.31	5.73	5.79	8.77	9.31	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	- Pelaksanaan kegiatan Business Gathering sesuai perencanaan baru dijadwalkan untuk dilaksanakan pada bulan Juni 2023	- Mereview ulang terkait jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan Business Gathering terkait penentuan tema pelaksanaan kegiatan, rundown acara serta Naresumber pada pelaksanaan kegiatan	- Ketua Tim Pemasaran dan Kemitraan
2	CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	- Dikarenakan pemenuhan pengadaan peralatan uji GCMS melalui impor, untuk proses pengadaannya masih menunggu terbitnya surat izin impor dari Menperin dimana proses pengajuan persetujuan penggunaan produk impor untuk peralatan pengujian telah disampaikan sesuai nota dinas nomor 170/BSK/JI/BSP/JPP/PIB/J/II/2023 tanggal 24 Maret 2023	- Monitoring progres penerbitan surat izin impor dari Menperin	- Kabag TU, Ketua Tim Rumah Tangga dan Pengadaan
3	CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	- Pengadaan peralatan uji laboratorium berupa unit GCMS menggunakan sumber anggaran PNPB tahun berjalan, sehingga dalam realisasi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan anggaran berdasarkan capaian realisasi penerimaan PNPB tahun berjalan.	- Monitoring capaian realisasi penerimaan PNPB dan menyusun rencana proyeksi belanja dalam rangka pengalokasian pendanaan untuk pelaksanaan tender peralatan uji laboratorium	- Kabag TU, Ketua Tim Keuangan dan Pengelolaan BMN, Bendahara Penerimaan, PPK BLU
4	CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	- Pengadaan peralatan uji laboratorium berupa unit GCMS menggunakan sumber anggaran PNPB tahun berjalan, sehingga dalam realisasi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan anggaran berdasarkan capaian realisasi penerimaan PNPB tahun berjalan	- Penyiapan dan penyusunan dokumen pengadaan untuk persiapan pelaksanaan tender pengadaan peralatan uji laboratorium	- PPK BLU, Ketua Tim Rumah Tangga dan Pengadaan, Ketua Tim Pengujian dan Pengambil Contoh
5	QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	- Progres pelaksanaan kegiatan DAPATI hingga Triwulan I masih terbatas pada pelaksanaan identifikasi dan koordinasi awal dengan pihak IKM dan internal Tim DAPATI dalam rangka menentukan jadwal rencana kerja sekaligus penentuan design teknologi yang akan diterapkan	- Pelaksanaan kegiatan DAPATI sesuai jadwal rencana kerja yang disusun serta melakukan penyusunan pelaporan monv progres pelaksanaan secara berkala	- Ketua Tim Kegiatan DAPATI, Ketua Tim Optimalisasi Teknologi
6	QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	- Atas pelaksanaan kegiatan DAPATI yang telah dijalankan, beberapa masih dalam proses pertanggungjawaban keuangan mengingat persetujuan DIPA atas realokasi anggaran kegiatan DAPATI 2023 baru ditetapkan pada 21 Februari 2023	- Mempercepat proses pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dijalankan serta menyusun rencana penarikan kebutuhan anggaran kedepannya	- Ketua Tim Kegiatan DAPATI, Ketua Tim Keuangan dan Pengelolaan BMN, Bendahara Pengeluaran

Semarang, April 2023

Kepala Balai Besar Gerdarjasa dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri



Sidik Herman

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi	: (247161) BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi	: 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi	: 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program	: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
5. Indikator Hasil	:
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan	: 6042 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke	: 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan	: Dr. Sidik Herman
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan	: Jl. Kimangsarkoro No. 6
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA	: SP DIPA-019.07.2.247161/2023

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	20,270,143	20,270,143	Terselenggaranya Layanan Manajemen Internal Satker	3 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-	170,165	170,165	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	41 Unit, m2, Paket
EBC Layanan Manajemen SDM Internal		-	583,510	583,510	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	136 Orang, Layanan, Rekomendasi
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	210,785	210,785	Terselenggaranya Layanan Manajemen Internal Satker	8 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	21,234,603	21,234,603		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	-	-	19.18	19.18	25.09	22.70	19.18	19.18	25.09	22.70	JAWA TENGAH
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	JAWA TENGAH
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	-	-	11.07	11.07	13.26	13.48	11.07	11.07	13.26	13.48	JAWA TENGAH
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	-	-	-	20.95	20.95	37.59	41.21	20.95	20.95	37.59	41.21	JAWA TENGAH
Jumlah	-	-	-	-	12.35	12.35	16.19	14.72	12.35	12.35	16.19	14.72	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Dikarenakan pemenuhan pengadaan perangkat inventaris perkantoran sebagian dipenuhi melalui impor, untuk proses pengadaannya masih menunggu terbitnya surat ijin impor dari Menperin dimana proses pengajuan persetujuan penggunaan produk impor untuk peralatan pengujian telah disampaikan sesuai nota dinas nomor 170/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023	- Monitoring progres penerbitan surat ijin impor dari Menperin	- Kabag TU; Ketua Tim Rumah Tangga dan Pengadaan
2.	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Dikarenakan pemenuhan pengadaan perangkat inventaris perkantoran sebagian dipenuhi melalui impor, untuk proses pengadaannya masih menunggu terbitnya surat ijin impor dari Menperin dimana proses pengajuan persetujuan penggunaan produk impor untuk peralatan pengujian telah disampaikan sesuai nota dinas nomor 170/BSKJI/BBSPJPPI/PBJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023	- Segera dilakukan penyusunan dokumen pengadaan untuk persiapan pelaksanaan pengadaan perangkat inventaris perkantoran	- PPK RM; Pejabat Pengadaan; Ketua Tim Rumah Tangga dan Pengadaan
3.	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	- Belum tersedianya jadwal pelaksanaan diklat/pelatihan peningkatan kompetensi SDM (struktural, fungsional dan pelatihan teknis) yang sesuai dengan kebutuhan program pelatihan	- Monitoring jadwal pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara dan pendaftaran pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pengembangan layanan dan peningkatan indeks profesionalitas ASN satker BBSPJPPI	- Kabag TU; Ketua Tim Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Semarang, April 2023

A Kepala Balai Besar Standar Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri



Dr. Sidik Herman

**RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Unit Organisasi : BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2 Persen	20%	1) Penyusunan rencana kolaborasi dengan industri dan Perguruan Tinggi 2) Pembentukan Tim kerjasama kolaborasi 3) Penyusunan proposal rencana kolaborasi dan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi	40%	1) Penyusunan MOU kerjasama kolaborasi 2) Koordinasi awal pelaksanaan kerjasama kolaborasi 3) Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 4) Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi	70%	1) Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 2) Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi	100%	1) Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 2) Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi 3) Pengukuran dan evaluasi capaian produktivitas/ efisiensi kegiatan kerjasama kolaborasi 4) Penyusunan pelaporan capaian kerjasama kolaborasi	Ketua Tim Kerja Optimalisasi Teknologi (Any Kurnia)	December 2023
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	5 Perusahaan	25%	I. Pemanfaatan Teknologi 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama 3) Pelaksanaan identifikasi lapangan dan uji coba skala laboratorium 4) Penyusunan rancangan design awal dan RAB 5) Presentasi design awal II. Implementasi Mutu/Standar 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan	50%	I. Pemanfaatan Teknologi 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan II. Implementasi Mutu/Standar 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan II. Implementasi Mutu/Standar 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan II. Implementasi Mutu/Standar 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan	75%	I. Pemanfaatan Teknologi 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan II. Implementasi Mutu/Standar 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan II. Implementasi Mutu/Standar 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan	100%	I. Pemanfaatan Teknologi 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan II. Implementasi Mutu/Standar 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan II. Implementasi Mutu/Standar 1) Promosi dan penyampaian penawaran layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi 2) Penyusunan kontrak kerjasama dan supervisi lapangan 3) Pelaksanaan dan supervisi lapangan 4) Uji coba dan pencarian kondisi optimum 5) Presentasi akhir dan serah terima pekerjaan	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF), Ketua Tim Kerja Optimalisasi Teknologi (Any Kurnia), Ketua Tim Kerja Pendampingan Konsultansi Industri (Rado Hana P)	December 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
3	Meningkatnya Kemampuan	1. Produktivitas/efisiensi p	10 Persen	25%	1) Identifikasi lapangan dalam rangka koordinasi awal Tim DAPATI dengan IKM terpilih 2) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan DAPATI 3) Persiapan dan pengadaan bahan/peralatan pendukung 4) Persiapan penyusunan laporan pendahuluan	50%	1) Pelaksanaan supervisi lapangan ke lokasi IKM terpilih 2) Pelaksanaan uji coba dan penentuan design operasi 3) Koordinasi internal Tim DAPATI 4) Penyusunan dan penyampaian laporan pendahuluan DAPATI 5) Penyiapan materi monev kegiatan DAPATI Pusat OPTIKJI BSKJI	75%	1) Pelaksanaan su	100%	1) Pelaksanaan supervisi	Ketua Tim DAPATI 2023 a) Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol (Januar Arif F); b) Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri (Nasuka)	December 2023
		2. Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	3 Persen	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF)	December 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
		3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	1940 SPK /Orde	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPi 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPi	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPi 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPi 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPi 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPi 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPi 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPi 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF)	December 2023
		4. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	8 Ruang Lingkup	30%	1) Penyiapan dokumen kelengkapan asesmen Lembaga Pemeriksa Halal 2) Pendampingan asesor pada asesmen Lembaga Pemeriksa Halal oleh BPJPH 3) Penyiapan dokumen tindak lanjut hasil asesmen LPH 4) Pengajuan usulan Penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Industri 5) Identifikasi peluang pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi	60%	1) Menyiapkan dokumen kelengkapan pengajuan sebagai Lembaga Verifikasi Industri 2) Pengajuan usulan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi ke KAN 3) Pelaksanaan asesmen dalam rangka pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi ke KAN 4) Menyiapkan tindak lanjut hasil asesmen KAN	80%	1) Pengajuan usulan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi ke KAN 2) Pelaksanaan asesmen dalam rangka pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/sertifikasi ke KAN 3) Menyiapkan tindak lanjut hasil asesmen KAN	100%	1) Monitoring penyelesaian tindak lanjut dan penerbitan sertifikat perluasan ruang lingkup oleh KAN	Ketua Tim Kerja Sertifikasi (MS. Edy), Ketua Tim Kerja Pengujian (Cholid S), Ketua Tim Kerja Kalibrasi (Adi P)	December 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
		5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62 Persen	30%	1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	50%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	75%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	100%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	Kabag TU, Ketua Tim Rumah Tangga dan Pengadaan	December 2023
4	Tercapainya Pengawasan	Rekomendasi hasil penga	92,5 Persen	15%	1) Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2) Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1) Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1) Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3) Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4) Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5) Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	100%	1) Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan (Kukuh AW)	December 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
5	Terselenggaranya Urusan p	Indeks kepuasan Masyara	3,65 Indeks	25%	1) Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)	50%	1) Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) 6) Pelaksanaan Temu Pelanggan untuk memperoleh umpan balik pelanggan	75%	1) Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)	100%	1) Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) 6) Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF)	December 2023
6	Terwujudnya ASN BSK.JI ya	1. Rata-rata indeks profes	78 Indeks	25%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	50%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	75%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	100%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	Ketua Tim Kerja Kepegawaian (Agung B)	December 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan	4.51	30%	1) Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDI, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDI. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5) Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6) Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin 7) Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik	50%	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDI. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	75%	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDI. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	100%	1) Update website secara berkala 2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF) Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital	December 2023
8	Penguatan Akuntabilitas Org	1. Nilai minimal akuntabilitas	81.6	30%	1) Penyusunan dokumen Tapkin 2) Penyusunan dokumen Renkin 3) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4) Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021	60%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2) Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen 3) Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III) 2) Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	100%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan (Kukuh Aryo W)	December 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
		2. Nilai minimal laporan keuangan	95	35%	1) Penyusunan laporan keuangan unaudited untuk pelaporan keuangan periode tahun sebelumnya 2) Koordinasi penyusunan laporan keuangan unaudited dengan bagian keuangan Ses BSKJI 3) Review laporan keuangan oleh Itjen 4) Pelaksanaan audit laporan keuangan unaudited oleh KAP	60%	1) Pelaksanaan penilaian laporan keuangan audited periode tahun sebelumnya oleh Biro Keuangan 2) Penyusunan laporan keuangan Semester I periode tahun berjalan 3) Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester I periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses BSKJI 4) Review laporan keuangan oleh Itjen	80%	1) Penyusunan laporan keuangan Triwulan III periode tahun berjalan	100%	1) Penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan 2) Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses BSKJI 3) Review laporan keuangan oleh Itjen 4) Pelaksanaan audit PIPK dalam rangka pelaporan keuangan tahun berjalan	Ketua Tim Kerja Keuangan (Nanik Karyawati)	December 2023

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN I TA. 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						% Fisik		Rencana	Kegiatan		
						Target Antara	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2 Persen	-	-	20%	10%	1) Penyusunan rencana kolaborasi dengan industri dan Perguruan Tinggi 2) Pembentukan Tim kerjasama kolaborasi 3) Penyusunan proposal rencana kolaborasi dan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi	B1 : Telah dilakukan penyusunan draf SK pembentukan Tim kerjasama kolaborasi B2 : Telah dilakukan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi dengan industri air minum dalam kemasan PT Bayuadi Nusantara Industries, PT Ungaran Sari Garmen . B3 : Koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi dengan perguruan tinggi UNNES, UNS, dan UNDIP	Belum mendapatkan partner kolaborasi	Koordinasi dengan tim kerjasama untuk menjangkau industri yang bersedia untuk berkolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam pengembangan Industri	5 Perusahaan	2 Perusahaan	-						
		1. Kerjasama Optimalisasi dan Pendampingan IPAL dengan PT MIRASA FOOD Industry				25%	20%	1) Finalisasi gambar desain 2) Setting lay out lapangan pada lokasi calon IPAL 3) Supervisi pembangunan IPAL tahap 1 dan 2	B1 : Finalisasi gambar desain mengikuti perubahan yang dikehendaki oleh PT MFI B2 : Melakukan setting lay out sesuai gambar desain final di calon lokasi IPAL B3 : Supervisi pembangunan IPAL yang telah dilakukan oleh PT MFI sesuai desain final tahap 1 (dari total 4 tahap)	Proses penyiapan lahan (cut and fill) memerlukan waktu cukup lama sehubungan adanya kendala teknis ketersediaan peralatan pendukung	Memantau kelanjutan pembangunan IPAL sesuai desain
		2. Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis dengan PT Desa Wisata Indonesia				85%	85%	1) Identifikasi dan penggalan data teknis 2) Penyusunan dokumen standar teknis 3) Presentasi draft dokumen standar teknis di PT. Desa Wisata Indonesia 4) Submit dokumen standar teknis ke DLH 5) Pemaparan dokumen Pertek dan penjelasan pada saat Penilaian Substantif di DLH 6) Perbaikan dokumen sesuai berita acara di Penilaian Substantif	B1 : 1) Penandatanganan SPK pada tanggal 2 Januari 2023 sesuai Nomor SPK T/1/BSKJ/BBSPJ/SPK/01/2023 2) Identifikasi serta penggalan data teknis B2 : 1) Penyusunan dokumen Standard teknis 2) Presentasi draft dokumen standar teknis di PT. Desa Wisata Indonesia tanggal 6 Februari 2023 3) Telah dilakukan submit dokumen standar teknis ke DLH tanggal 24 februari 2023 B3 : 1) Screening awal dan dilakukan perbaikan dokumen yang harus direvisi lalu dilakukan submit dokumen standar teknis ke DLH kembali tanggal 20 Maret 2023 2) Pemaparan Pertek atau penilaian substansi di DLH tgl 30 Maret 2023	Tidak ada kendala	Perbaikan dokumen sesuai berita acara di Penilaian Substantif
3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	10 Persen	-	-						
		A. Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol				10%	10%	1. Survey data teknis dan identifikasi proses 2. Penyusunan draft PKS 3. Diskusi internal terkait teknologi yang diaplikasikan	B1 : Diskusi internal terkait teknologi yang diaplikasikan B2 : Penyusunan draft PKS B3 : Survey data teknis dan identifikasi proses	Desain teknis awal direncanakan untuk ruang pengeringan berahan bakar solar, IKM mempunyai rencana pembastaran ruang pengeringan kedua Sehingga untuk pemasangan alat terkontrol menunggu ruang pengeringan selesai dibangun.	Pembelian bahan dan konstruksi peralatan
		B. Konsultansi Optimalisasi proses produksi garam konsumsi beryodium dan garam aneka industri				10%	10%	1. Survey data teknis dan fisik 2. Penandatanganan SPK 3. Diskusi rencana penerapan teknologi	B1 : Diskusi rencana penerapan teknologi B2 : Penyusunan SPK B3 : Survey lapangan untuk mendapatkan data teknis dan fisik.	IKM baru dapat proses saat supplai bahan baku tersedia dan menunggu sekitar bulan Mei - Juni.	Sambil menunggu proses akan dilakukan pemantapan teknologi yang direncanakan
		2.Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	3 Persen	-	-	25%	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJ/PI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pembertan jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJ/PI	B1 : 1. Promosi/penyebarnyaan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik dan kegiatan study banding (BP. Batam) 2.Penerimaan PNBP BBSPJ/PI Januari 2023 : Rp 1.285.445.440,- (8,57%) dari target Rp 15.000.000.000,- B2 : Penerimaan PNBP Januari - Februari Rp 2.020.549.443,- (13,47%) dari target. B3 : Penerimaan PNBP Januari-Maret sebesar : Rp. 2.915.573.770,- (19,44 %) dari target.	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Ruang lingkup layanan kolaborasi masih terbatas. 3. Kegiatan layanan jasa belum kembali optimal pasca pandemi Covid-19 4. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain. 5. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJ/PI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJ/PI	1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						% Fisik		Rencana	Kegiatan		
						Target Antara	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	1940 SPK /Order	830		25%	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI	B1 : Menarik data dari SINDII, jumlah transaksi/order Januari untuk • Pengujian : 194 transaksi • Kalibrasi : 9 transaksi • Sertifikasi : 32 transaksi B2 : Menarik data dari SINDII, jumlah transaksi/order Bulan Februari untuk • Pengujian : 232 transaksi • Kalibrasi : 13 transaksi • Sertifikasi : 53 transaksi B3 : Menarik data dari SINDII, jumlah transaksi/order Maret untuk • Pengujian : 231 transaksi • Kalibrasi : 11 transaksi • Sertifikasi : 55 transaksi Jumlah seluruh transaksi Januari-Maret sebanyak 830 transaksi	1. Sebagian masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPI, dikarenakan kurangnya mengenai/informasi tentang BBSPJPI 2. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 3. Ruang lingkup layanan kalibrasi masih terbatas. 4. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain dengan alasan harga dan penyelesaian LHU	1. Peningkatan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Penambahan ruang lingkup pengujian dan kalibrasi 3. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 4. Dilakukan kunjungan/supervisi pelaksanaan layanan ke industri yang pernah menjadi pelanggan BBSPJPI untuk mendapatkan masukan
		4. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	-		30%	30%	1) Penyediaan dokumen kelengkapan asesmen Lembaga Pemeriksa Halal 2) Pendampingan asesor pada asesmen Lembaga Pemeriksa Halal oleh BPJPH 3) Penyediaan dokumen tindak lanjut hasil asesmen LPH 4) Pengajuan usulan Penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Industri 5) Identifikasi peluang pengajuan perluasan ruang lingkup pengujian/kalibrasi/ sertifikasi	B1 : 1) Telah dilakukan penyusunan dan penyediaan dokumen kelengkapan persyaratan untuk proses pengajuan akreditasi LPH BBSPJPI 2) Proses asesmen awal dalam rangka akreditasi LPH BBSPJPI oleh Tim Asesmen BPJPH telah dilaksanakan pada 15 sd 17 Februari 2023 3) Pembahasan tindak lanjut hasil asesmen LPH BBSPJPI pada 27 Februari 2023. Dokumen hasil tindak lanjut telah disampaikan kepada Tim Sesmen BPJPH pada 23 Maret 2023 B2 : 1) Pelaksanaan asesmen awal dalam rangka akreditasi LPH BBSPJPI telah dilaksanakan pada 15 sd 17 Februari 2023 oleh Tim Asesor BPJPH 2) Telah dilakukan pembahasan tindak lanjut atas hasil asesmen awal pengajuan akreditasi LPH BBSPJPI pada 27 Februari 2023. Bukti tindak lanjut hasil asesmen telah disampaikan kepada Tim Asesor BPJPH pada tanggal 28 Februari 2023 dan menunggu hasil verifikasi dari BPJPH B3 : 1) Pengajuan usulan sebagai Lembaga Verifikator Independen Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP sesuai Nota Dinas Kepala BSKJI kepada Menperin Nomor B/168/BSKJI/ND/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 2) Identifikasi parameter yang akan diakreditasi 3) Usulan parameter yang akan diakreditasi yaitu - Lab AK : Hg dalam garam - Lab Udara : ISBB (Indeks Suhu Bola Basah) , Kebisingan Ruang kerja , Intensitas Cahaya - Lab Instrumen : Logam Cd, Pb, Zn, Cu dan Ni pada air laut ; Logam Al pada air minum ; Boron pada air permukaan 4) Verifikasi dan validasi pengujian parameter yang akan diakreditasi.	1) Sesuai hasil asesmen, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan diperlukan pergantian personil Sumber Daya Syariah pada organisasi LPH BBSPJPI	1) Telah dilakukan pergantian/penunjukan personil Sumber Daya Syariah yang baru pada organisasi LPH BBSPJPI 2) Melengkapi dokumen persyaratan untuk penunjukan Lembaga Verifikator Independen (LVI) Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP
		5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62 Persen	18.02		30%	30%	1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5) Melaksanakan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	B1 : 1) Mengidentifikasi potensi penggunaan PDN/TKDN pada kegiatan pengadaan barang/jasa; 2) Penginputan data rencana pengadaan di aplikasi SIRUP LKPP; 3) Melakukan tagging PDN di rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP; 4) Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa; 5) Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon B2 : 1) Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa; 2) Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon B3 : 1) Mengajukan persetujuan penggunaan produk impor untuk peralatan pengujian, spare part, dan bahan-bahan untuk pengujian di laboratorium sesuai nota dinas nomor 170/BSKJI/BBSPJPI/PB/III/2023 tanggal 24 Maret 2023; 2) Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa; 3) Penginputan data P3DN pada aplikasi Siswas P3DN BPKP 4) TKDN BBSPJPI Bulan Januari-Maret 2023 sebesar 18,02 %	1) Proses penginputan data RUP pada aplikasi SIRUP membutuhkan waktu yang lama terutama pada jam-jam kerja;	1) Menginput data RUP pada malam hari (bukan jam kerja);
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5 Persen	-	-	15%	15%	1) Koordinasi penyusunan dan penyediaan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2) Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	B1 : 1) Penyampaian ND Ka BBSPJPI Nomor 11/BSKJI/BBSPJPI/PR/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPI Tahun 2023 2) Masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan BBSPJPI Tahun 2023 B2 : 1) Sesuai hasil koordinasi awal dengan pihak Inspektorat III, sesuai rencana pelaksanaan audit kinerja periode 2023 pada satker BBSPJPI dijadwalkan pada bulan September 2023	belum terdapat kendala	1) Koordinasi dengan bagian keuangan BBSPJPI untuk penyediaan berkas dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan 2022 sebagai persiapan pelaksanaan audit kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut	
						% Fisik		Rencana	Kegiatan			Realisasi
						Target Antara	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	Indeks kepuasan Masyarakat	3.65 Indeks	3.648		25%	25%	1) Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3) Penanganan dan pemantauan komplain/keuhan pelanggan 4) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5) Evaluasi dan penghitungan statistik penilaian IKM (IPP dan IPAK)	B1 : 1. Evaluasi SPM Januari rata-2 SPM : 11, 25 hari (530 sampel) 2. Penyebaran kuesioner sejumlah 121 pelanggan, kembali sebanyak 39 kuesioner B2 : 1. Evaluasi SPM Januari rata-2 SPM : 10,55 hari (1008 sampel) 2. Penyebaran kuesioner sejumlah 97 pelanggan, kembali sebanyak 22 kuesioner 3. Hasil evaluasi penilaian Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) a. Nilai Indeks : A b. IPP : 3.740 rata-2 Indeks 93,508. c. IPAK : 3.891 rata-2 Indeks 97,277 B3 : 1. Evaluasi SPM Januari rata-2 SPM : 10,55 hari (1549 Sampel) 2. Penyebaran kuesioner sejumlah 97 pelanggan, kembali sebanyak 23 kuesioner 3. Hasil evaluasi penilaian Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) a. Nilai Indeks : A b. IPP : 3.848 rata-2 Indeks 91,193. c. IPAK : 3.727 rata-2 Indeks 93,182	1. Tingkat partisipasi / keterlibatan pelanggan dalam pengisian kuesioner SKM belum sesuai harapan 2. Beberapa yang mengisi kuesioner bukan user-nya. 3. Sebagian pelanggan memberikan penilaian cukup. 4. Informasi terkait fasilitas/sarpras layanan dan upaya peningkatan layanan belum sepenuhnya terinformasi ke pelanggan (tidak semua pelanggan mengakses media informasi BBSPJPP)	1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Lebih intensif dalam pemberian edukasi kepada pelanggan terkait layanan melalui WA, telpon, pada momen pelitihan, audit maupun sampling 4. Peningkatan kualitas layanan (layanan Prima) 5. Dilakukan supervisi pelaksanaan layanan secara berkala 6. Menjadwalkan acara business gathering sebagai jembatan informasi dan komunikasi dengan pelanggan (rencana akan dilaksanakan akhir bulan Juni 2023)	
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78 Indeks	-		25%	25%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	B1 : 1. Telah disusun rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural TA 2023 2. Fasilitasi Pelatihan Teknis Penyegeran Skema Sertifikasi, SNI dan Proses Bisnis 3. Fasilitasi Pelatihan Teknis Analisa, Pengambilan Contoh dan Perhitungan Pengujian Sampel Udara (Emisi, Ambien, Kebisingan, ISBB) dan Jaminan Mutu. B2 : 1. Fasilitasi pelatihan udara TKBT (Tenaga Kerja Bangunan Tinggi) tingkat II di Indonesia Power. B3 : 1. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi PPC Lingkungan (Air dan Udara) 2. Fasilitasi persiapan pelatihan PPC Produk. 3. Pegawai BBSPJPP yang sudah mengikuti workshop/Bimtek/Seminar/webinar Bulan Januari-Maret 2023 sebanyak 72 pegawai.	Belum tersedianya jadwal peaksanaan diklat/pelatihan peningkatan kompetensi SDM (struktural, fungsional dan pelatihan teknis) yang sesuai dengan kebutuhan program pelatihan	Monitoring jadwal pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara dan pendaftaran pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pengembangan layanan dan peningkatan indeks profesionalitas ASN satker BBSPJPP	
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal Indeks layanan publik	4.51	-		20%	20%	1) Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDII, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDII. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudan diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5) Update dan upload informasi jasa layanan BBSPJPP melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6) Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin 7) Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik (bimtek/study banding)	B1 : 1. Belum dilakukan penyusunan /draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDII, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) masih menggunakan SK 2023, (Belum terlaksana, menunggu menunggu pelatihan Ka. Balai). 2. Pengembangan dashboard SINDII modul HALAL. 3. Update informasi layanan publik; website (berkala), pembuatan video e-training (proses), update medsos (berkala dan setiap waktu kegiatan BBSPJPP). B2 : 1. Pengembangan dashboard SINDII modul HALAL dan update modul e training B3 : 1. Pengembangan dashboard SINDII modul HALAL dan update modul e training, video e-training (proses upload) 2. Peningkatan kompetensi SDM : pelatihan penyusunan Daftar Informasi Kearsipan (DIK), Daftar Informasi Publik (DIP), web programing (rencana bulan April 2023) 3. Pendaftaran produk AIMS pada kanal mic.kemenperin.go.id	1. SK-SK terkait layanan publik belum diterbitkan/update 2. Belum semua fitur pada sistem layanan mengakomodir kebutuhan pelanggan dan pegawai di Balai. 3. Sistem pendokumentasian/ pengarsipan yang masih belum terintegrasi 4. Terbatasnya SDM di bidang IT. 5. Kurangnya pemahaman pelanggan dalam penggunaan sistem informasi yang sudah disediakan. 6. Penyelesaian pengembangan platform sistem jasa layanan membutuhkan waktu cukup lama (Masih tergantung pada eksternal)	1. Pengembangan sistem informasi yang user friendly bagi pelanggan data m mengakses jasa layanan Balai. 2. Pengembangan website yang lebih informatif dan mudah diakses. 3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung IT. 4. Pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir seluruh jasa. ayanan di Balai. 5. Perkuat Sistem layanan 1 pintu 6. Monitoring dan evaluasi kepada pelanggan yang memberikan penilaian IKM rendah. 7. Pendokumentasian arsip yang terintegrasi. 8. Pengembangan kapabilitas-kompetensi SDM di bidang IT (*NOTE* : Edukasi kepada pelanggan terkait informasi yang disajikan (secara offline maupun online), pengembangan SINDII agar mudah dipahami, informatif dan mudah digunakan)	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						% Fisik		Rencana	Kegiatan		
						Target Antara	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,6	-		30%	30%	<p>1) Penyusunan dokumen Tapkin</p> <p>2) Penyusunan dokumen Renkin</p> <p>3) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I)</p> <p>4) Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021</p>	<p>B1 :</p> <p>1) Telah dilakukan penyusunan dan penyampaian usulan dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPPi TA 2023 sesuai ND Ka BBSPJPPi Nomor 12/BSKJ/BBSPJPPi/PR/2023 tanggal 12 Januari 2023.</p> <p>2) Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renkin) TA 2024 sebagai dasar acuan pengajuan usulan anggaran BBSPJPPi TA 2024. Dokumen Renkin BBSPJPPi TA 2024 telah disusun pada 27 Januari 2023 dengan besaran pengajuan usulan anggaran sebesar Rp. 38.965.780.000,-</p> <p>3) Pengumpulan data capaian kinerja bulanan dan pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Smart DJA, eMonev Bappenas)</p> <p>B2 :</p> <p>1) Telah dilakukan penyesuaian usulan dokumen Tapkin/Perkin BBSPJPPi TA 2023 sesuai hasil masukan bagian Program Sekretariat BSKJ. Dokumen Tapkin/Perkin BBSPJPPi TA 2023 telah disetujui dan ditandatangani pada 10 Februari 2023</p> <p>2) Pengumpulan data capaian kinerja bulanan dan pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Smart DJA, eMonev Bappenas)</p> <p>B3 :</p> <p>1) Telah dilakukan penyiapan dokumen kelengkapan bukti tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode 2021</p> <p>2) Telah dilakukan penyiapan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP periode 2023 pada satker BBSPJPPi</p> <p>3) Pelaksanaan koordinasi persiapan evaluasi SAKIP Satker BSKJ Tahun 2023 pada 16 Maret 2023</p> <p>4) Koordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP pada satker BBSPJPPi</p>	<p>1) Masih terdapat kelengkapan dokumen penilaian SAKIP yang belum tersedia sampai dengan batas akhir waktu upload dokumen yang ditetapkan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III</p>	<p>1) Komunikasi dan penyampaian kelengkapan dokumen yang belum tersedia sebelumnya pada saat pelaksanaan klarifikasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III</p>
		2. Nilai minimal laporan keuangan	95	-		35%	35%	<p>1) Penyusunan laporan keuangan unaudited untuk pelaporan keuangan periode tahun sebelumnya</p> <p>2) Koordinasi penyusunan laporan keuangan unaudited dengan bagian keuangan Ses BSKJ</p> <p>3) Review laporan keuangan oleh Ijen</p> <p>4) Pelaksanaan audit laporan keuangan unaudited oleh KAP</p>	<p>B1 :</p> <p>1) Penyiapan dokumen dan kelengkapan untuk audit laporan keuangan BLU 2023 oleh KAP</p> <p>2) Rekonsiliasi SAKTI dan OMSPAN data keuangan</p> <p>3) Mengikuti pra workshop penyusunan LK BSKJ 2023 pada 19 Januari 2023</p> <p>4) Mengikuti workshop penyusunan LK BSKJ 2023 pada 31 Januari sd 2 Februari 2023</p> <p>5) Penyusunan laporan keuangan unaudited 2023 dan data dukung laporan</p> <p>6) Telah dilakukan penunjukan KAP Ashari & Ida Nurhayati untuk proses audit laporan keuangan BLU BBSPJPPi 2023 berdasarkan SPK Nomor 58/BSKJ/BBSPJPPi/PBJ/II/2023 tanggal 13 Februari 2023</p> <p>7) Pelaksanaan dan penilaian PIPK satker BBSPJPPi periode tahun 2023.</p> <p>B2 :</p> <p>1) Pembukaan audit laporan keuangan BLU BBSPJPPi 2023 oleh KAP pada 13 Februari 2023</p> <p>2) Pengumpulan kelengkapan permintaan data audit BPK</p> <p>3) Pelaksanaan review atas laporan keuangan unaudited 2023 oleh Tim Inspektorat III pada 20-24 Februari 2023</p> <p>4) Catatan atas Laporan Keuangan BBSPJPPi 2023 (Unaudited) telah disusun dan disampaikan ke Biro Keuangan pada 17 Februari 2023</p> <p>B3 :</p> <p>1) Closing Meeting audit laporan keuangan BLU BBSPJPPi 2023 oleh KAP pada 24 Maret 2023</p> <p>2) Pengisian Capaian Output periode bulan Jan-Feb pada aplikasi SAKTI.</p>		



Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BB SPJPPI TA 2023

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 32.370.086.000

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	6077.AEF - Pemasaran, Promosi, Publikasi Dan Pembinaan Hubungan Pelanggan Layanan Teknis	255.070.000	2,82%	0,45%	0,00%	27,00%
2.	6077.BAD - Layanan Konsultansi Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	717.550.000	5,52%	4,30%	10,00%	10,00%
3.	6077.BAD - Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Industri	192.530.000	0,00%	10,34%	0,00%	0,00%
4.	6077.BAD - Layanan Validasi Dan/atau Verifikasi Grk	26.200.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	6077.BAD - Layanan Audit Energi /audit Air / Audit Lingkungan	193.350.000	0,00%	0,00%	10,00%	11,50%
6.	6077.BAD - Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan	28.400.000	8,45%	0,00%	10,00%	31,00%
7.	6077.BAD - Layanan Sertifikasi Industri Hijau	37.000.000	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
8.	6077.BAD - Layanan Sertifikasi Produk	434.760.000	22,40%	29,03%	20,00%	34,00%
9.	6077.BAD - Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	37.600.000	0,00%	0,00%	10,00%	34,00%
10.	6077.BAD - Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi	206.330.000	7,90%	17,61%	10,00%	34,00%
11.	6077.BAD - Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	45.390.000	1,32%	1,98%	5,00%	0,00%
12.	6077.BAD - Layanan Pengujian Aneka Komoditi	825.000.000	15,15%	0,00%	5,00%	95,00%
13.	6077.BAD - Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran	3.279.280.000	18,39%	28,61%	5,00%	95,00%
14.	6077.BAD - Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian	1.310.510.000	41,23%	54,91%	5,00%	0,00%
15.	6077.CAH - Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	3.354.000.000	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
16.	6077.QDI - Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol	100.470.000	4,54%	0,00%	5,00%	6,70%
17.	6077.QDI - Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium Dan Garam Aneka Industri	92.043.000	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
18.	6042.EBA - Operasional Perkantoran Dan Pimpinan	3.363.083.000	10,80%	14,80%	0,00%	0,00%
19.	6042.EBA - Pengelolaan Data Dan Informasi	401.880.000	18,66%	18,99%	20,00%	26,00%
20.	6042.EBA - Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor	668.957.000	0,10%	0,16%	0,00%	0,00%
21.	6042.EBA - Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	65.160.000	15,35%	15,31%	0,00%	0,00%
22.	6042.EBA - Gaji Dan Tunjangan	13.881.963.000	21,01%	20,96%	0,00%	17,00%
23.	6042.EBA - Penyelenggara Poliklinik	62.250.000	3,92%	5,77%	0,00%	26,00%
24.	6042.EBA - Pengadaan Bahan Makanan Dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	199.800.000	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25.	6042.EBA - Pemeliharaan Sarana Kantor	126.010.000	4,83%	18,79%	0,00%	26,00%
26.	6042.EBA - Pemeliharaan Alat Laboratorium	490.000.000	22,93%	34,86%	0,00%	17,00%
27.	6042.EBA - Pemeliharaan Kendaraan Operasional	249.400.000	10,86%	22,01%	0,00%	26,00%
28.	6042.EBA - Langganan Daya Dan Jasa	711.000.000	20,35%	19,73%	0,00%	25,00%
29.	6042.EBA - Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah/buku	50.640.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30.	6042.EBB - Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	131.565.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31.	6042.EBB - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	38.600.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32.	6042.EBC - Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Asn	112.930.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33.	6042.EBC - Pengelolaan / Manajemen Sdm	126.980.000	8,79%	19,69%	0,00%	0,00%

34.	6042.EBC - Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	287.780.000	0,00%	13,76%	0,00%	0,00%
35.	6042.EBC - Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional	55.820.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36.	6042.EBD - Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	36.900.000	41,08%	41,08%	15,00%	23,75%
37.	6042.EBD - Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	35.645.000	0,76%	10,06%	35,00%	43,00%
38.	6042.EBD - Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	103.800.000	61,46%	24,48%	90,00%	90,00%
39.	6042.EBD - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi / Zona Integritas / Spip	34.440.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	32.370.086.000	16,17%	18,13%	3,17%	22,49%

[Realisasi Per Akun >>](#) [Daftar Kendala >>](#) [Summary Permasalahan >>](#)

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	36.900.000	41%	41,1%	20,3%	23,8%
2.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	35.645.000	10%	10,1%	38,8%	48,9%
3.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	103.800.000	24%	24,5%	47,5%	47,5%
4.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi / Zona Integritas / SPIP	34.440.000	0%	0%	25%	33%
5.	Pengelolaan Data dan Informasi	401.880.000	19%	19,0%	30%	26%
6.	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah/Buku	50.640.000	0%	0%	28,5%	29,5%
7.	Operasional perkantoran dan pimpinan	3.363.083.000	15%	14,8%	25%	26%
8.	Langganan Daya dan Jasa	711.000.000	20%	19,7%	25%	25%
9.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	668.957.000	0%	0,2%	25%	31,2%
10.	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	249.400.000	22%	22,0%	25%	26%
11.	Pemeliharaan Alat Laboratorium	490.000.000	35%	34,9%	25%	26%
12.	Pemeliharaan Sarana Kantor	126.010.000	19%	18,8%	25%	26%
13.	Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	199.800.000	0%	0%	25%	26%
14.	Penyelenggara Poliklinik	62.250.000	6%	5,8%	25%	26%
15.	Gaji dan Tunjangan	13.881.963.000	21%	21,0%	25%	21%
16.	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	65.160.000	15%	15,3%	18,8%	18,8%
17.	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	38.600.000	0%	0%	0%	0%
18.	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	131.565.000	0%	0%	0%	0%
19.	Pengelolaan / Manajemen SDM	126.980.000	20%	19,7%	25%	26%
20.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis ASN	112.930.000	0%	0%	10%	10%
21.	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	55.820.000	0%	0%	10%	10%
22.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	287.780.000	14%	13,8%	10%	10%
23.	Pemasaran, Promosi, Publikasi dan Pembinaan Hubungan Pelanggan Layanan Teknis	255.070.000	0%	0,5%	22,5%	27%
24.	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	3.354.000.000	0%	0%	25%	28%
25.	Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	717.550.000	4%	4,3%	18,9%	22%
26.	Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	192.530.000	0%	10,3%	22,5%	31,5%
27.	Layanan Validasi dan/atau Verifikasi GRK	26.200.000	0%	0%	15%	15%
28.	Layanan Audit Energi /Audit Air / Audit Lingkungan	193.350.000	0%	0%	11,4%	11,5%
29.	Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan	28.400.000	0%	0%	18,9%	22%
30.	Layanan Sertifikasi Industri Hijau	37.000.000	0%	0%	20%	20%
31.	Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Pengujian	1.310.510.000	55%	54,9%	27,5%	27,5%
32.	Layanan Sertifikasi Produk	434.760.000	29%	29,0%	30%	34%
33.	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran	3.279.280.000	29%	28,6%	27,5%	27,5%
34.	Layanan Pengujian Aneka Komoditi	825.000.000	0%	0%	27,5%	27,5%
35.	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	45.390.000	2%	2,0%	27,5%	27,5%
36.	Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Lembaga Sertifikasi	206.330.000	18%	17,6%	30,9%	34%
37.	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	37.600.000	0%	0%	30%	34%
38.	Jasa Konsultasi Optimalisasi proses sistem pengeringan terkontrol	100.470.000	0%	0%	8%	6,7%
39.	Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri	92.043.000	0%	0%	10%	10%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

6042.EBD - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Penyusunan dokumen satuan 3B (pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi)	Oktober	22,2%	25%	Lapor Progres Selesai
2.	Penyusunan dokumen TOR dan RAB (pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi)	Oktober	12,5%	25%	Lapor Progres Selesai
3.	Penyusunan renja KL (pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi)	Oktober	12,5%	25%	Lapor Progres Selesai

6042.EBD - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pengisian aplikasi monev kinerja (Monev Perkin, Smart DJA, eMonev Bappenas)	Desember	25%	16%	Lapor Progres Selesai

6042.EBD - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan dan BMN	Desember	25%	25%	Lapor Progres Selesai

6042.EBD - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi / Zona Integritas / SPIP

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Persiapan	Desember	25%	40%	Lapor Progres Selesai
2.	pelaksanaan	Desember	25%	35%	Lapor Progres Selesai
3.	pelaporan	Desember	25%	0%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Pengelolaan Data dan Informasi

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Mapping kegiatan perbaikan dan penambahan perangkat jaringan kantor	Mei	50%	30%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah/Buku

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Submission, pengecekan plagiarms dan review naskah KTI utk terbitan volume 1	April	75%	70%	Lapor Progres Selesai
2.	Penyelesaian adminstrasi tahunan : crossreff dan domain jurnal	Juli	20%	15%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Operasional perkantoran dan pimpinan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi Belanja Operasional Keperluan Perkantoran, Ekspedisi Barang dan Surat, Persediaan Barang Konsumsi	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai
2.	Fasilitasi Belanja Jasa Perkantoran dan Jasa Lainnya	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai
3.	Fasilitasi Belanja Barang, Honorarium dan Aset Tetap Lainnya	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Langgan Daya dan Jasa

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
-----	---------	-------------	-----------------------------------	-----------------	--

1.	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembayaran layanan daya dan jasa	Desember	25%	25%	Lapor Progres Selesai
----	---	----------	-----	-----	-------------------------

6042.EBA - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Rekapitulasi Usulan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	Juni	50%	51%	Lapor Progres Selesai
2.	Realisasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Berdasarkan Skala Prioritas dan Kedaruratan Penggunaan	Nopember	20%	28%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Pemeliharaan Kendaraan Operasional

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pemeliharaan dan Operasional Rutin Kendaraan Dinas Plat Merah	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Pemeliharaan Alat Laboratorium

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pemeliharaan rutin dan Perbaikan Kerusakan Peralatan Laboratorium	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Sarana Perkantoran	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi penyediaan bahan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Penyelenggara Poliklinik

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Poliklinik Layanan Kesehatan Internal dan Obat-obatan untuk Pegawai	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Gaji dan Tunjangan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pertanggungjawaban serta pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan	Desember	25%	21%	Lapor Progres Selesai

6042.EBA - Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi Koordinasi Pengelolaan Kearsipan dan Pengadaan Barang Jasa	Desember	25%	25%	Lapor Progres Selesai

6042.EBC - Pengelolaan / Manajemen SDM

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi Layanan Pengelolaan/Manajemen SDM meliputi Kenaikan Pangkat, Usulan DUPAK Fungsional, Cuti dll	Desember	25%	26%	Lapor Progres Selesai

6042.EBC - Pendidikan dan Pelatihan Teknis ASN

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen SDM Internal	Desember	10%	10%	Lapor Progres Selesai

6042.EBC - Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi Diklat Fungsional dan Kesekretariatan Fungsional Tertentu	Desember	10%	10%	Lapor Progres Selesai

6042.EBC - Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Fasilitasi Diklat Teknis dan Sertifikasi kompetensi Pegawai Internal	Desember	10%	10%	Lapor Progres Selesai

6077.AEF - Pemasaran, Promosi, Publikasi dan Pembinaan Hubungan Pelanggan Layanan Teknis

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Persiapan	Desember	25%	50%	Lapor Progres Selesai
2.	Pelaksanaan	Desember	25%	20%	Lapor Progres Selesai

6077.CAH - Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Penyusunan dokumen pengadaan	April	50%	60%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan kegiatan layanan konsultansi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	Nopember	11,1%	15%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Persiapan	Desember	25%	35%	Lapor Progres Selesai
2.	Pelaksanaan	Desember	25%	35%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Validasi dan/atau Verifikasi GRK

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Persiapan akreditasi LVV	Oktober	30%	30%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Audit Energi /Audit Air / Audit Lingkungan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Promosi jasa layanan untuk mendapatkan customer pengguna jasa	September	14,3%	15%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	

1.	Pelaksanaan pelayanan jasa sertifikasi ISO 14001;2015 kepada klien tahun 2023	Nopember	11,1%	15%	Lapor Progres Selesai
----	---	----------	-------	-----	-------------------------

6077.BAD - Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Pengujian

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan	Desember	25%	25%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Sertifikasi Produk

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan pelayanan jasa sertifikasi produk kepada klien tahun 2023	Desember	25%	30%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan	Desember	25%	25%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Pengujian Aneka Komoditi

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan	Desember	25%	25%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan	Desember	25%	25%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Lembaga Sertifikasi

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan akreditasi LPH BBSPJPPI	Nopember	27,3%	50%	Lapor Progres Selesai
2.	Pelaksanaan pemeliharaan kelembagaan Lembaga Sertifikasi (LSIH, LSPro, LSSML, LSSM) BBSPJPPI	Desember	25%	10%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan pelayanan jasa layanan sertifikasi ISO 9001:2015 kepada pelanggan	Desember	25%	30%	Lapor Progres Selesai

6077.QDI - Jasa Konsultasi Optimalisasi proses sistem pengeringan terkontrol

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Melakukan pembahasan konsep kerjasama dan penyelesaian PKS	Maret	100%	80%	Lapor Progres Selesai
2.	Melakukan pengumpulan data eksisting proses industri (energi, waktu, bahan bakar)	Mei	33,3%	30%	Lapor Progres Selesai

MATRIK DIKLAT TAHUN 2023

No	Jenis Pelatihan	Nama Peserta	Tgl Pelaksanaan	Penyenggara (Tempat Pelaksanaan)
1	Pelatihan Teknis Penyegaran Skema Sertifikasi, SNI dan Proses Bisnis	Aditya Pradhana Agastya Aji Pranayoga Agung Budi Prihanto Agung Budiarto Aniek Yuniati Sisworo Any Kurnia Argentha Ardhy Arif Hidayat Chevia Nadia Laksmisari Cholid Syahrone Danny Widyakusuma Hermawan Dedy Widya Asiyanto Dyah Ahsina Fahriyati Eni Susana Ericha Fatma Yuniati Erlin Ristiana Erni Susanti Fajar Ari Hidayat Farida Crisnaningtyas Hendriyanto Herry Yuli Christyyanto Iin Farida Ikha Rasti Julia Sari Kukuh Aryo Wicaksono Krus Haryanto Lutfia Yutria Safitri M. Syarifudin Edy Nugroho Marissa Fajarina Retnaningtyas Meyliza Fatmasari Misbakhul Anam Nasuka Ningsih Ika Pratiwi Novarina Irnaning Handayani Novembri Cucu Sektiani Agustin Nur Hamid Patricia Lityaningtyas Rachmat Amir Rame Rizal Awaludin Malik Sidna Kosim Amrulah Slamet Sumarsono Soemarlina Yuni Wulandari Sri Wahyuningsih Toto Sofiaro	4 - 6 Januari 2023	BBSPJPI
2	Pelatihan Teknis Analisa, Pengambilan Contoh dan Perhitungan Pengujian Sampel Udara (Emisi, Ambien, Kebisingan, ISBB) dan Jaminan Mutu	Aditya Pradhana Agung Setiawan Ahsan Zuhri Miftahuddin Ayu Kristina Ambarwati Besse Minta Sari Eni Susana Esti Sri Hardiyanti Faiz Ainul Huda Fajar Ari Hidayat Fajar Sandy Ridwansyah Hardika Firmansyah Labib Munzakka M. Samsul Arifin Moushinta Putri Ali	11-13 Januari 2023	BBSPJPI

No	Jenis Pelatihan	Nama Peserta	Tgl Pelaksanaan	Penyenggara (Tempat Pelaksanaan)
		Muhammad Wahyudi		
		Nani Nurliyanti		
		Nofi Adiyanto		
		Novembri Cucu Sektiyani Agustin		
		Patricia Lityaningtyas		
		Riska Wahyu Arum Kusuma Sari		
		Septerina Nuning		
		Sidna Kosim Amrullah		
		Siti Hurriyatul Aminah		
		Siti Rahmawati		
		Syarifatul Munawaroh		
		Toto Sofiaro		
		Yoga Jati Raharjanto		
		Yohan Kaleb Setiadi		
		Yose Andriani		
		Yuliana Sari Pratiwi		
3	Bimbingan Teknis Verifikasi Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri	Sanyoto Widagdo Rini Rarasati	30 - 31 Januari 2023	Dirjen IKM & Aneka Kemenperin
4	Sosialisasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan	Galih Kadarisno	16 Maret 2023	Biro OSDM Kemenperin

**DATA PEGAWAI YANG DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT
PERIODE JANUARI-MARET 2023**

No	Nama	Pangkat Awal	Pangkat yang diusulkan
	Tidak ada		
	Usul kenaikan pangkat periode April 2023		
1	Sanyoto Widagdo	3c	3d
2	Suharni Malaina	3d	4a
3	Argentha Ardhy	3b	3c
4	Arif Hidayat	3a	3b
5	Danny Widyakusuma H	3b	3c
6	lin Farida	3c	3d
7	Rahayu	3c	3d
8	Herry Yuli C	3b	3c
9	Yoga Jati R	2c	2d
10	M.Syarifuddin Edy N	3c	3d

**DATA PEGAWAI YANG DJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE JANUARI-MARET 2023**

No	Nama	Pelanggaran	Jenis Hukuman Disiplin
	-		-

**DATA MUTASI/ROTASI/PROMOSI PEGAWAI
PERIODE JANUARI-MARET 2023**

No	Nama	Penempatan /Jabatan Lama	Penempatan /Jabatan Baru
1	Emmy Suryandari, ST,MTM	Kepala BBSPJPI	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

**DATA PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN
PERIODE JANUARI-MARET 2023**

No	Nama	TMT Pensiun
1	Erlin Ristiana	01 April 2023

**REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PERIODE JANUARI-MARET 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	21
3	S1	43
4	D3	38
5	D1	1
6	SMA	4

**REKAPITULASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PERIODE JANUARI-MARET 2023**

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Jenjang Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural		1
2	Pembina Industri	Ahli Madya	2
		Ahli Muda	11
		Ahli Pertama	2
3	Perekayasa	Madya	1
		Pertama	6
4	Teknisi Penelitian dan Perekayasa	Penyelia	4
		Pelaksana	10
5	Assesor Manajemen Mutu Industri	Muda	3
		Pertama	3
6	Pustakawan	Muda	1
		Penyelia	1
7	Penguji Mutu Barang	Muda	4
		Ahli Pertama	12
		Mahir	3
		Terampil	9
		Penyelia	1
8	Arsiparis	Penyelia	1
		Mahir	1
		Terampil	1
9	Pranata Humas	Madya	0
		Muda	1
10	Analisis Anggaran	Muda	1
12	Analisis kepegawaian	Muda	2
13	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Ahli Pertama	1
14	Pranata Komputer	Muda	1
15	Fungsional Umum ASN		28
16	Pegawai Non ASN		30

**DATA PENGADUAN/KELUHAN MASYARAKAT
PERIODE JANUARI - MARET 2023**

No	Nama Instansi	Uraian	Tindak Lanjut
	tidak ada		

**DATA PENANGANAN GRATIFIKASI
PERIODE JANUARI-MARET 2023**

No	Nama Instansi	Uraian	Tindak Lanjut
	tidak ada		

**DATA WHISTLEBLOWING
PERIODE JANUARI-MARET 2023**

No	Uraian	Tindak Lanjut
	tidak ada	

DATA PRESTASI
PERIODE JANUARI-MARET 2023

No	Instansi pemberi penghargaan	Uraian penghargaan
1	Kementerian Perindustrian	Piagam Penghargaan Pengawasan kearsipan Internal Kategori Unit Pengolah Arsip Peringkat I
2	Kementerian Perindustrian	Atas nama Mapriti Aning Pryaningtyas sebagai arsiparis teladan kategori keterampilan peringkat 2



[w.http://bbtpi.kemenperin.go.id](http://bbtpi.kemenperin.go.id)